

**INTEGRASI SEBARAN LOKASI SMP
DAN SEBARAN PERMUKIMAN DI KOTA PATI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

HARGITO
L4D 007068



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**INTEGRASI SEBARAN LOKASI SMP
DAN SEBARAN PERMUKIMAN DI KOTA PATI**

Tesis diajukan kepada :
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

HARGITO
L4D 007068

Diajukan Pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 25 Maret 2009

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 25 Maret 2009

Pembimbing II

Pembimbing I

M. Mukti Ali, SE, MSi, MT

Ir. Retno Susanti, MT

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain, maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh tanggung jawab

Semarang, 25 Maret 2009

HARGITO
NIM L4D 007068

Hidup adalah melakukan tugas
yang tidak pernah terselesaikan
sampai kita mati

Belajar tanpa guru
adalah tersesat

(Kho Ping Hoo)

Kupersembahkan:
Untuk anakku Arum, Dira, Liz Ta
dan istriku Retno Handayati

ABSTRAK

Pembangunan kawasan permukiman ditujukan untuk mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau disekitarnya. Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan kota adalah disamping permukiman yang sudah ada, muncul permukiman-permukiman baru yang tersebar di daerah pinggiran yang tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan SMP. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati. Tujuannya adalah mengkaji integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati. Sedangkan sasaran yang akan dilakukan meliputi: (1) sebaran permukiman, (2) sebaran lokasi SMP, (3) sebaran penduduk usia sekolah, (4) pemanfaatan lahan, (5) jaringan jalan, dan (6) analisis integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman.

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan spasial (keruangan) untuk memahami kondisi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman. Pendekatan keruangan ini dilakukan dengan melakukan buffer dan overlay peta jangkauan lokasi SMP, peta kebutuhan SMP menggunakan standar peraturan PU 1987 yang telah disahkan menjadi SNI 2004, peta pemanfaatan lahan dan peta jarak dari jalan. Sedangkan data yang dibutuhkan adalah data sekunder berupa sebaran permukiman, sebaran lokasi SMP, jumlah penduduk usia sekolah, pemanfaatan lahan dan jaringan jalan. Data sekunder tersebut diperoleh dari Bappeda, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.

Hasil temuan yang diperoleh adalah pola sebaran lokasi SMP di Kota Pati adalah berkelompok dan membentuk pusat pelayanan di BWK Pusat Kota. Kondisi ini sesuai dengan teori Sujarto (1988), Bintarto (1986) dan Walter Christaller dalam Djojodipuro.M (1992), bahwa distribusi fasilitas lokasi terdapat pada kedudukan pusat pelayanan dan dipengaruhi faktor kepadatan penduduk dan lingkungan. Permukiman-permukiman di daerah pinggiran kota ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan SMP belum tercapai padahal batas ambang minimum penduduk melebihi kapasitasnya dan sudah melebihi jangkauan lokasi maksimum. Kondisi ini belum sesuai dengan teori Dillinger (1994), Glony dalam Woro (1993) dan peraturan PU 1987 (SNI 2004) yang menyatakan bahwa perkembangan kota membutuhkan pelayanan diukur dari sisi supply-demand, daya lahan dan standar saat ini.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa daerah pinggiran kota yakni BWK I, BWK II dan BWK III memiliki sebaran permukiman yang terpencar yang diakibatkan karena lahan pertanian. Dengan sebaran lokasi SMP yang terkonsentrasi di BWK Pusat Kota teridentifikasi kebutuhan dan jarak jangkauan sarana SMP yang ada pada daerah pinggiran kota dari permukiman ke pusat pelayanan sarana SMP tidak optimal. Untuk mengintegrasikan sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman yang tidak optimal, maka di daerah BWK II yaitu desa Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo dan Gajahmati sebagai prioritas pertama dan di Desa Sukokolon, Ngawen, Penambuhan dan Margorejo di Daerah BWK III sebagai prioritas kedua merupakan lokasi untuk pengadaan sarana SMP yang terintegrasi dengan sebaran permukiman di daerah pinggiran. Untuk mendukung penelitian ini, maka direkomendasikan untuk melakukan perencanaan dengan cara pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Dengan dukungan ketersediaan fasilitas sarana SMP yang baru integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman dapat tercapai sesuai kebutuhan pelayanan pendidikan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Pati.

Kata kunci: Integrasi, sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman.

ABSTRACT

*Settlement development areas aim to integrate comprehensive settlement and to increase the quality of settlement exist inside the environment and its surrounding. In the city development process, many city development frequently face a problem. It is the unavailability of junior high school education facilities inside the old and the new settlement. Based on the problem above, the writer holds a research entitle **INTEGRATION OF JUNIOR HIGH SCHOOL LOCATION SPREAD AND THE SETTLEMENT SPREAD AT PATI CITY**. This research purposes to study the spread integration of the junior high school and settlement location in PATI regency. The targets of this research are: (1) the settlement spread, (2) the junior high school location, (3) the school age inhabitant, (4) the land utilization, (5) the road network, and (6) the integrated spread analysis of school location and settlement.*

The spatial approach in order to understand the junior high school and settlement location spread. The writer does buffer and overlay to the junior high school location reach, and junior high school need map by using PU 1987 Standard rule legalized as SNI 2004 (about the land utilization map, and the road distance map). The data of this research is the secondary data of the settlement spread; the number of the school age inhabitant, land and highway network using, the writer gets the data from The Agency for Regional Development, the Statistical Central Agency, and the Education office of PATI regency.

The result of this research is the system of the junior high school location spread in PATI regency tend to make group, and form the service central in the central city "BWK". This condition is appropriate with Sujarto (1988, Bintarto (1986), and Walter Christaller in Djojodipuro.M (1992). They state that the environment and inhabitant dense influences the distribution of location facilities in the city central service. The city edge inhabitant cannot get a good junior high school education facility services, because the minimal threshold boundary exceeds the maximum location reach. In contrast, this condition is not appropriate with Dilinger (1994), Glony in Woro (1993), and PU 1998 rule 1987 (SNI 2004). They state that the city development needs a service with the supply demand, land capacity, and the recent standard measurement considerations.

Based on the analysis, the writer conclude that the city edge area (BWK I, BWK II, BWK III) has a separated settlement spread because of the agriculture land. The writer identifies that the need and the junior high school reach distance facility exist in the edge city settlement to the junior high school facilities service central is unoptimum. The writer identifies it by using the junior high school location spread concentration of BWK city central. In order to integrate the unoptimum settlement spread and junior high school location spread, the city government should supply the junior high school facility to the some areas. They are: the BWK II area either: Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo, Gajahmati village as the first priority, and Sukokulon, Ngawen, Penambuhan, Margorejo village in BWK III as the second priority location. The writer suggests that the city government does the building planning for junior high school by using new school unit building way (USB). The writers hopes that the availability of the new junior high school facility support can reach the integration of junior high school location spread and the settlement spread based on the education needed service.

Key word : Integration, the junior high school location spread, settlement spread.

KATA PENGANTAR

Semoga kesejahteraan selalu dilimpahkan Allah kepada kita semua.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan bimbingan-Nya penulis dapat menyusun tesis ini dengan rasa syukur.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis :

- BPKLN Departemen Pendidikan Nasional, selaku pemberi dana beasiswa Program Pascasarjana di Universitas Diponegoro.
- Ir. Retno Susanti, MT (Pembimbing I) dan M. Mukti Ali, SE, Msi, MT (Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan pengertian terhadap segala kondisi yang dimiliki penulis, sejak awal hingga selesainya tesis ini.
- Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc (Penguji I) dan Dra. Bitta Pigawati, MT (Penguji II) yang telah memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan tesis ini.
- Kepada yang tercinta istri dan anakku terima kasih atas do'anya dan support yang selalu mengiringi kehidupan penulis.
- Rekan-rekan MPWK Diknas-2 A atas kebersamaan, masukan serta kritik dan saran selama menyusun tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan dan bantuan tulus yang telah diberikan kepada penulis.

Semarang, 25 Maret 2009

Hargito

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Sasaran Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.5.1. Ruang Lingkup Subtansial.....	6
1.5.2. Ruang Lingkup Spasial.....	7
1.6. Kerangka Pemikiran.....	10
1.7. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	12
1.7.1. Pendekatan Penelitian.....	12
1.7.2. Metode Penelitian.....	12
1.7.2.1. Karangka Analisa.....	13
1.7.2.2. Kebutuhan Data.....	15
1.7.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.7.3. Teknik Analisis.....	17
1.7.3.1. Analisis Deskriptif.....	18
1.7.3.2. Analisis <i>Buffer</i>	18
1.7.3.3. Analisis <i>Overlay</i>	21
BAB II KAJIAN LITERATUR INTEGRASI SEBARAN LOKASI SMP DAN SEBARAN PERMUKIMAN DI KOTA PATI	23
2.1. Pengertian Integrasi.....	23
2.2. Perkembangan Kota.....	24
2.2.1. Distribusi Spasial.....	27
2.2.2. Hirarki Tempat Pusat (<i>Central Place</i>).....	31
2.2.3. Permukiman Kota.....	34

2.3. Fasilitas Kota.....	38
2.4. Fasilitas Pendidikan.....	41
2.5. Lokasi Sekolah.....	44
2.6. Kesenjangan Kebutuhan.....	47
2.7. Konsep Ruang <i>Neighborhood Unit</i>	51
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA PATI.....	56
3.1. Kondisi Perwilayahan Kota Pati.....	56
3.2. Tata Guna Lahan Eksisting.....	59
3.3. Kependudukan.....	62
3.3.1. Kepadatan Penduduk.....	62
3.3.2. Penduduk Usia Sekolah.....	64
3.4. Jaringan Jalan.....	66
3.5. Sarana Transportasi.....	69
3.5.1. Terminal.....	69
3.5.2. Moda Transportasi.....	70
3.6. Sebaran Lokasi SMP.....	70
3.7. Permukiman.....	73
3.8. Arah Kebijakan Pembangunan.....	75
BAB IV ANALISIS INTEGRASI SEBARAN LOKASI SMP DAN SEBARAN PERMUKIMAN DI KOTA PATI.....	81
4.1. Analisis Sebaran Permukiman.....	81
4.2. Analisis Jangkauan Lokasi SMP.....	85
4.3. Analisis Kebutuhan SMP.....	90
4.4. Analisis Pemanfaatan Lahan.....	94
4.5. Analisis Jarak Pelayanan Jalan Terhadap Lokasi SMP.....	97
4.6. Analisis Intergrasi Sebaran Lokasi SMP dan Sebaran Permukiman.....	99
4.7. Perencanaan.....	104
4.8. Hasil Temuan Penelitian.....	107
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	109
5.1. Kesimpulan.....	109
5.2. Rekomendasi.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Kebutuhan Data.....	15
TABEL I.2	: Skor Jangkauan Lokasi SMP.....	19
TABEL I.3	: Skor Kebutuhan SMP.....	19
TABEL I.4	: Skor Pemanfaatan Lahan.....	20
TABEL I.5	: Skor Jarak Pelayanan Jalan.....	20
TABEL II.1	: Standar Fasilitas Sosial dan Ekonomi.....	43
TABEL II.2	: Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik.....	46
TABEL II.3	: Rangkuman Kajian Teori.....	55
TABEL III.1	: Fungsi Bagian Wilayah Kota.....	57
TABEL III.2	: Tata Guna Lahan Eksisting.....	60
TABEL III.3	: Kepadatan Penduduk.....	63
TABEL III.4	: Banyaknya Penduduk Usia SMP.....	65
TABEL III.5	: Data SMP Negeri dan Swasta di Kota Pati.....	72
TABEL III.6	: Jumlah Siswa dan Rombongan Belajar dan Luas Lahan	72
TABEL III.7	: Banyaknya Rumah.....	74

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Peta Administratif Kabupaten Pati.....	8
GAMBAR 1.2	: Peta Administratif Kota Pati.....	9
GAMBAR 1.3	: Kerangka Pikir.....	11
GAMBAR 1.4	: Kerangka Metodologi.....	14
GAMBAR 1.5	: Diagram Kerja Analisis <i>Overlay</i>	21
GAMBAR 2.1	: Perkembangan Kota.....	25
GAMBAR 2.2	: Pendekatan Pemekaran Kota.....	29
GAMBAR 2.3	: Jenis Pola Penyebaran.....	35
GAMBAR 3.1	: Peta Bagian Wilayah Kota.....	58
GAMBAR 3.2	: Peta Penggunaan Lahan.....	61
GAMBAR 3.3	: Peta Jaringan Jalan.....	68
GAMBAR 3.4	: Peta Sebaran SMP.....	71
GAMBAR 3.5	: Peta Permukiman Kota Pati.....	76
GAMBAR 3.6	: Kota Berbentuk <i>Fragmented City</i>	78
GAMBAR 4.1	: Perbandingan Permukiman dan Lahan.....	85
GAMBAR 4.2	: Peta Skor Jangkauan Pelayanan SMP.....	88
GAMBAR 4.3	: Peta Skor Kebutuhan SMP.....	91
GAMBAR 4.4	: Peta Skor Pemanfaatan Lahan.....	95
GAMBAR 4.5	: Peta Skor Jarak Pelayanan Jalan.....	96
GAMBAR 4.6	: Peta Arah Sebaran Lokasi.....	100
GAMBAR 4.7	: Peta Integrasi Sebaran Lokasi SMP dan Sebaran Permukiman.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Nearest Neighbour</i> Statistik.....	117
Riwayat Hidup Penulis.....	118

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota adalah merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan (Permendagri No. 2, Tahun 1987).

Pemekaran kota dan pertumbuhan penduduk yang pesat akan mempengaruhi perkembangan perekonomian kota. Perkembangan ini akan menimbulkan konsekuensi terhadap kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan, khususnya di daerah pinggiran kota. Menurut Sudjarto (1989), wilayah pinggiran adalah wilayah yang timbul akibat proses pertumbuhan wilayah tertentu dengan aktivitasnya yang biasanya bersifat agraris dan non agraris yang ditandai dengan interaksi antara manusia dengan komoditasnya, sehingga wilayah pinggiran dapat pula disebut sebagai kota desasi. Di sekeliling pusat kota terdapat bermacam-macam pemanfaatan lahan, terutama untuk perumahan dan pertumbuhan kota keluar melahirkan pinggiran yang disebut *sub urban*. Dugaan bahwa masyarakat di daerah pinggiran kota mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dari sisi kebijaksanaan seperti di sentral kota, terjadi infrastruktur yang belum mapan menyebabkan proses pembangunan tidak seimbang dan pelayanan yang tidak optimal.

Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu

dengan pelaksanaan yang bertahap. Pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud ditujukan untuk mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau disekitarnya (UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). Sedangkan konsep penyediaan sarana secara efisien dan ekonomis dalam melayani seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan yang integratif diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan secara optimal karena ditempuh dengan memadukan semua aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara fungsional dan spasial.

Pembangunan daerah pinggiran kota melalui pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) yaitu dengan memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan dasar bagi kehidupan masyarakat seperti penyediaan pendidikan dapat mengurangi kesenjangan. Pelayanan dasar yaitu fasilitas pelayanan dasar, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya (UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman). Fasilitas pelayanan dasar meliputi antara lain adalah fasilitas pendidikan. Hakikat pendidikan adalah: (1) interaksi yang terjadi secara manusiawi, (2) membina dan mengembangkan potensi peserta didik, (3) berlangsung sepanjang hayat, (4) sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan individu, (5) ada keseimbangan antara kebebasan peserta didik dengan aturan, (6) meningkatkan kualitas hidup manusia.

Perkembangan Kota Pati berdampak pada perkembangan sektor-sektor ekonomi di Kota Pati telah menyebabkan perkembangan kawasan fisik terbangun.

Bahkan pengembangan yang terjadi telah meluas hingga keluar batas administrasi kota (RUTRK Pati 2005-2014). Perkembangan tersebut di atas, dewasa ini mengarah pada kawasan pinggiran kota, sehingga penyebaran pusat-pusat permukiman tersebar ke daerah pinggiran, permukiman di daerah pinggiran tersebut seperti Perumahan Gunung Bedah Permai, Perumahan Sukoharjo, Perumahan Rondole Indah, Perumahan Sekar Kurung di Kecamatan Margorejo dan Perumahan Kutoharjo Permai, Perumahan Puri Indah, Perumahan Winong, Perumahan Wijaya Kusuma di Kecamatan Pati.

Kondisi kewilayahan Kota Pati seperti yang sudah dijelaskan di atas mengakibatkan penyebaran lokasi dan sarana dan prasarana pendidikan khususnya SMP yang sudah ada tersebar dengan jarak yang tidak mudah terjangkau, karena hampir semua lokasi SMP berada di daerah pusat kota. Akibat dari kondisi ini, masyarakat/orang tua merasa terbebani dengan ongkos transportasi karena lokasi sekolah yang jauh dari permukiman, belum lagi beban psikologis karena anak-anak mereka harus nglaju melewati jalan besar dengan lalu lintas yang padat. Adanya 4 (empat) BWK di Kota Pati diharapkan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dapat tertampung untuk sub-sub desa lainnya secara merata dan terintegrasi dengan permukiman.

Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar khususnya SMP sangat penting untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan sarana dan prasarana ini diharapkan menjadi faktor penting dalam memberikan pelayanan sarana dasar bagi masyarakat kota dan pencapaian Program Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pati, arah pembangunan Kota Pati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan regional, sehingga pelaksanaannya harus merupakan penerapan dan pelengkap dari pelaksanaan pembangunan nasional. Kota Pati sebagai Ibukota Kabupaten Pati berfungsi menjadi pusat pelayanan masyarakat bagi kepentingan-kepentingan yang berskala kabupaten. Selain itu Kota Pati yang termasuk dalam kawasan kerjasama strategis Wanarakuti (Juwana-Jepara-Kudus-Pati) menjadi simpul-simpul (*nodes*) dalam pengembangan wilayah Kabupaten Pati. Untuk mendukung perkembangan Kota Pati, menuntut peningkatan pelayanan-pelayanan kebutuhan masyarakat di dalam kota.

Dalam aspek fisik, tersedianya lokasi sekolah yang terintegrasi dengan permukiman akan tercipta lingkungan yang menyenangkan. Tersedianya sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam belajar. Bila sarana ini tersedia dengan baik, maka variabel ini saja sudah dapat meningkatkan prestasi sebesar 26% (Mulyana ed, 2004). Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan belajar serta pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan (Depdiknas, 2004).

Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan kota adalah munculnya permukiman-permukiman baru di daerah pinggiran kota yang tidak didukung dengan ketersediaan fasilitas sarana pendidikan SMP. Permukiman-permukiman baru yang berada di pinggiran kota mengakibatkan sebaran lokasi SMP yang ada sekarang tidak terintegrasi dengan perkembangan permukiman-permukiman baru.

Adanya kendala tersebut maka diperlukan integrasi sebaran lokasi SMP dan perkembangan permukiman agar masyarakat dapat mencapai kebutuhan secara optimal dari pusat permukiman ke tempat sarana sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Pati dapat memenuhi suatu intensitas hubungan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya secara fungsional.

Atas dasar rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : bagaimanakah integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati ?

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati.

1.3.2. Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Teridentifikasinya sebaran permukiman di Kota Pati.
2. Teridentifikasinya sebaran lokasi Sekolah Menengah Pertama
3. Teridentifikasinya sebaran penduduk usia sekolah.
4. Teridentifikasinya penggunaan lahan di Kota Pati.
5. Teridentifikasinya jaringan jalan di Kota Pati.
6. Dihasilkannya integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman bermanfaat untuk menentukan strategi dalam peningkatan pelayanan sarana dasar bagi masyarakat kota khususnya pendidikan SMP sehingga menunjang peningkatan kualitas SDM.

Dari sisi praktis, integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman akan bermanfaat sebagai bahan kajian dalam penyusunan perencanaan pengembangan pendidikan yang memadukan pola perkembangan kota dengan kemampuan anggaran pemerintah dengan skala prioritas dan kondisi eksternal ruang perkotaan. Bagi sekolah, keterbatasan yang ada pada sekolah dapat dilengkapi dengan partisipasi masyarakat lewat komite sekolah. Bagi perencana tata kota, dapat menambah pemahamannya tentang integrasi permukiman dan kebutuhan dunia pendidikan khususnya SMP.

Secara teoritis, analisis integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman, bermanfaat dalam mendorong pemikiran kritis terhadap berbagai teori yang hendak dikaji dengan kondisi praktis, khususnya kasus pada Kota Pati.

1.5. Ruang Lingkup Studi

1.5.1. Ruang Lingkup Substansial

Dengan maksud memperjelas dan memfokuskan permasalahan, penulis membatasi ruang lingkup substansial sebagai berikut:

1. Membahas fisik kewilayahan kota meliputi sebaran permukiman, tata guna lahan dan jaringan jalan.
2. Membahas karakteristik persebaran lokasi SMP.

3. Membahas karakteristik persebaran/kepadatan penduduk dan penduduk usia SMP.
4. Menganalisis integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman dengan menggunakan metode analisis SIG melalui analisa *buffer* dan *overlay*.

1.5.2. Ruang Lingkup Spasial

Objek penelitian mengambil lokasi di Kota Pati. Kota Pati merupakan Ibu Kota Kabupaten Pati. Memiliki letak yang sangat strategis karena terletak di tengah-tengah Kabupaten Pati dan berada pada jalur Pantura (Pantai Utara) Pulau Jawa. Secara geografis Kota Pati terletak di antara 111°00'-111°05' Bujur Timur dan 6°42'-6°47' Lintang Selatan dengan luas wilayah 5.250 hektar. Secara administratif wilayah Kota Pati meliputi 22 kelurahan/desa di Kecamatan Pati, yaitu: Pati Wetan, Pati Kidul, Plangitan, Puri, Winong, Ngarus, Pati Lor, Parenggan, Kalidoro, Sidokerto, Gajahmati, Mustokoharjo, Sidoharjo, Semampir, Sarirejo, Geritan, Dengkek, Sugiharjo, Widorokandang, Kutoharjo, Pajunan, Blaru dan 9 desa di Kecamatan Margorejo, yaitu: Sukoharjo, Sukokulon, Jimbaran, Ngawen, Margorejo, Penambuhan, Langenharjo, Dadirejo, Muktiharjo dan sebagian Badegan. Kota Pati di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Juwana di sebelah timur, sebelah barat dengan Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Gabus di sebelah selatan.

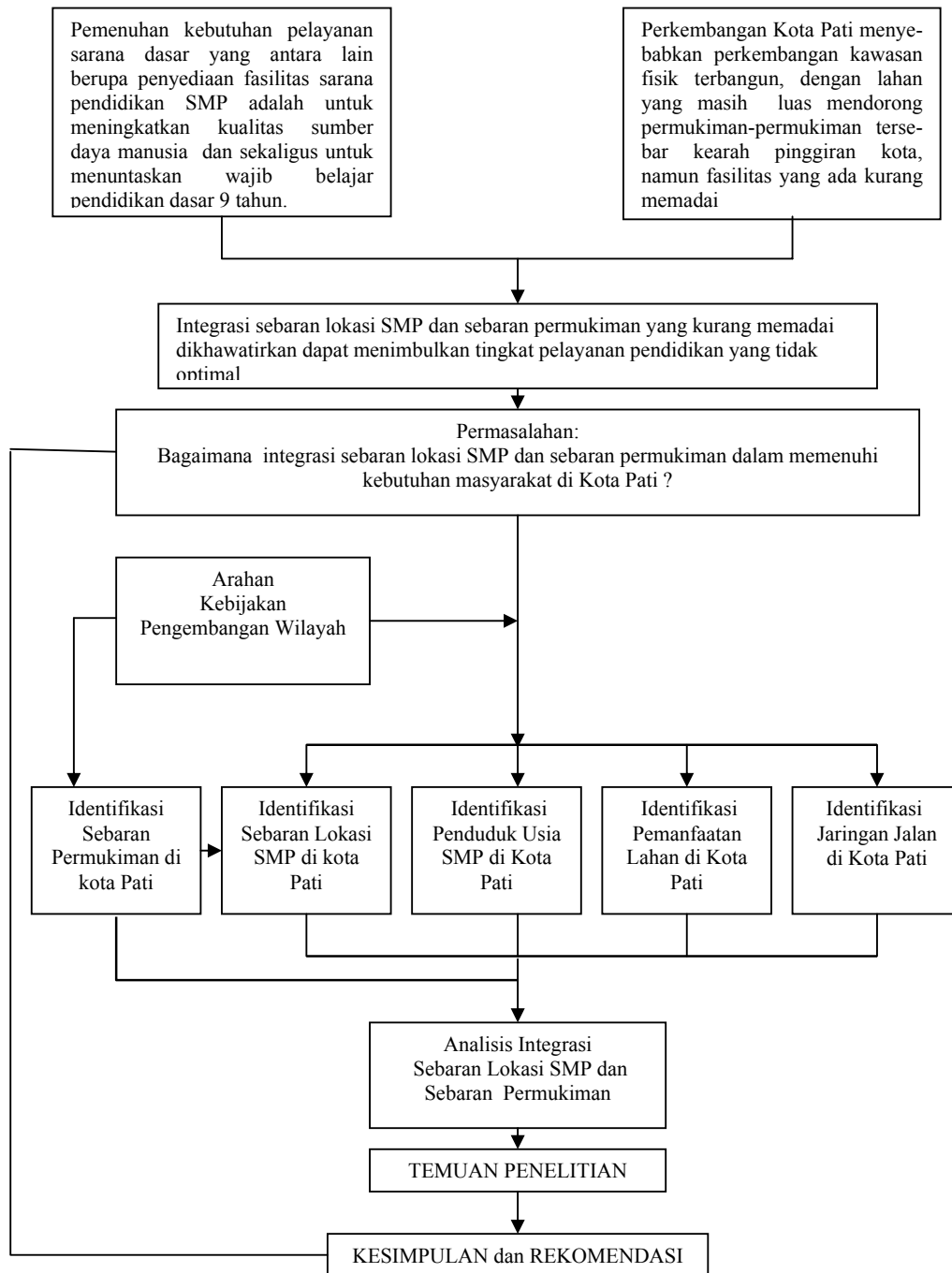
Gambaran yang lebih jelas disajikan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 sebagai berikut:

1.6. Kerangka Pemikiran

Pembangunan kota dimaksudkan agar meningkatkan kesejahteraan dan membantu masyarakat kota dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk mencapai maksud tersebut dibutuhkan pemenuhan kebutuhan pelayanan sarana dasar yang antara lain berupa penyediaan fasilitas–fasilitas kebutuhan masyarakat di dalam kota yaitu fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Peningkatan pelayanan sarana dasar berupa fasilitas sarana pendidikan SMP dibutuhkan seiring dengan penambahan penduduk dan terjadinya sub urbanisasi penduduk. Pada saat ini, di samping pemukiman yang sudah ada, nampak peningkatan pembangunan permukiman-permukiman baru di daerah pinggiran Kota Pati. Permasalahan yang dihadapi adalah permukiman-permukiman di wilayah pinggiran tidak didukung dengan ketersediaan fasilitas sarana pendidikan yang tidak memadai yaitu integrasi sebaran lokasi dan sebaran permukiman yang kurang merata tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan kota yang semakin meluas ke wilayah pinggiran. Atas dasar permasalahan tersebut maka dibuat suatu research question, yaitu: Bagaimana integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati?

Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori yang relevan, pengamatan di lapangan, catatan lapangan, penggunaan dokumen, analisis dan interpretasi data, serta mengambil kesimpulan dan rekomendasi.

Selanjutnya kerangka pemikiran dapat disajikan dalam Gambar 1.2 sebagai berikut:



Sumber : Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 1.3
KERANGKA PIKIR
INTEGRASI SEBARAN LOKASI SMP
DAN SEBARAN PERMUKIMAN DI KOTA PATI

1.7. Pendekatan dan Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Kajian integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di kota Pati, tidak dapat dilepaskan dari proses interaksi peserta didik dengan dengan lingkungannya. Sebagaimana disebutkan oleh Daldjoeni (1998), bahwa interaksi keruangan merupakan suatu pengertian yang dalam geografi sosial dipakai untuk mendapatkan gambaran yang gamblang mengenai pengaruh keruangan dan relasi yang ada antara manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.

Pengaruh keruangan dan relasinya, akan mengarah kepada bagaimana sebaran lokasi suatu fasilitas, seberapa jauh jarak (*distance*) antar berbagai fasilitas dan permukiman, bagaimana kaitan (*interaction*) antara fasilitas tersebut dengan permukiman dan bagaimana gerakan (*movement*) manusia yang menggunakan fasilitas tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan, dengan harapan akan lebih mudah dalam memahami kondisi sebaran lokasi SMP dan perkembangan permukiman.

1.7.2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan metode penelitian adalah menyangkut prosedur dan teknik yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Prosedur menunjuk pada urutan pekerjaan yang harus dilakukan, sedangkan teknik mengarah pada alat yang akan digunakan (Nasir, 2003).

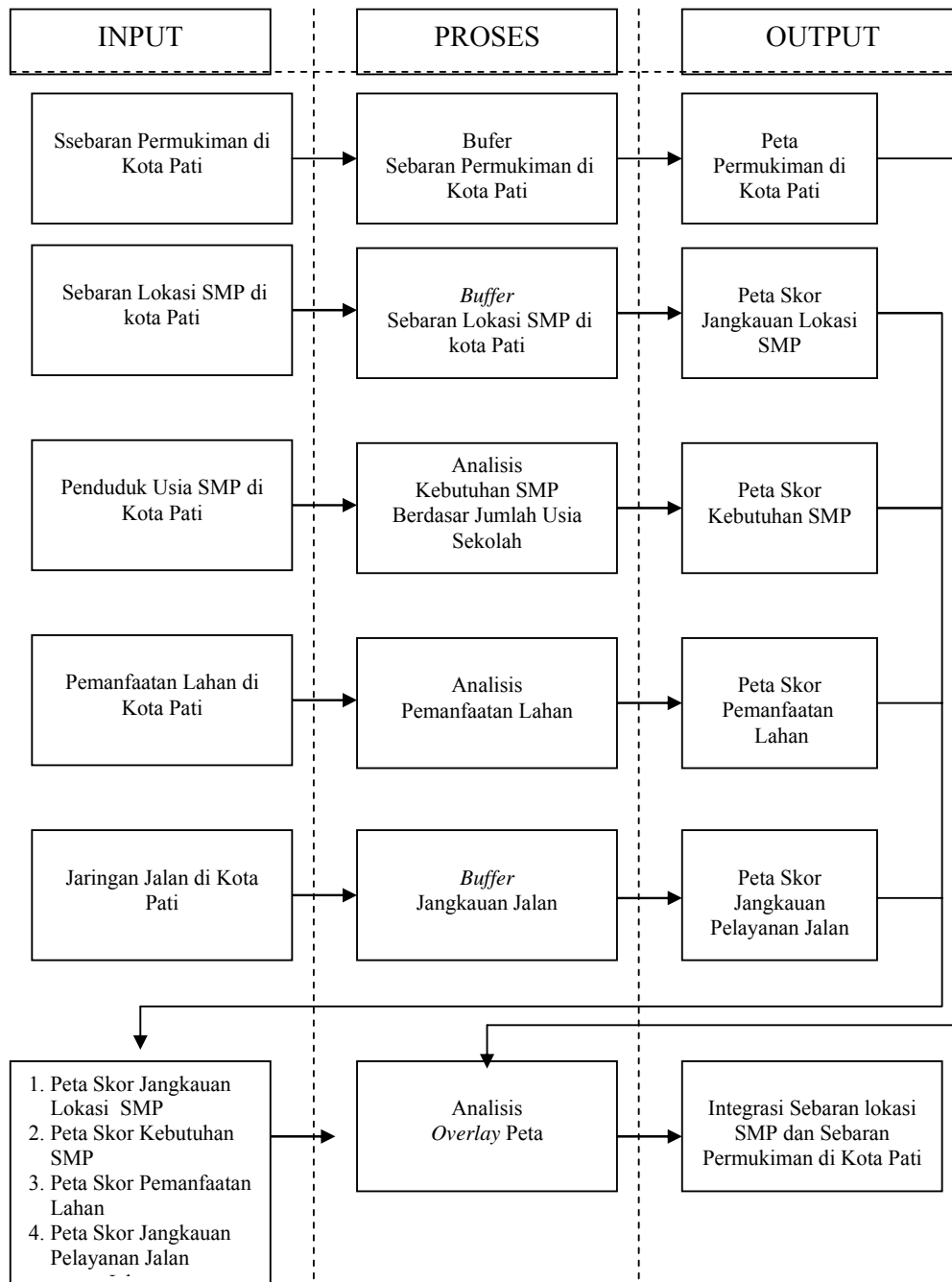
Prosedur penelitian integrasi lokasi SMP dan sebaran permukiman dalam ruang perkotaan, meliputi tahapan pelaksanaan, penentuan variabel, jenis data,

pengolahan data dan penyajian laporan. Teknik penelitian, mengarah pada metode dan alat pengumpulan data, analisis terhadap data yang dikumpulkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Eksploratif, oleh Sugiyono (2005), dijelaskan pengertian statistik deskriptif adalah memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Lebih jelas W.Gulo (2002) menerangkan, tipe penelitian ini didasarkan pada pertanyaan dasar yang kedua, yaitu *bagaimana*. Kita tidak puas bila hanya mengetahui apa masalahnya secara eksploratif, tetapi ingin mengetahui juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Dengan demikian, temuan-temuan dari penelitian deskriptif lebih luas dan lebih terperinci. Dengan pendekatan deskriptif eksploratif bermaksud (1) mendeskripsikan kondisi wilayah penelitian berdasarkan kondisi nyata khususnya mengenai sebaran lokasi SMP, sebaran permukiman dengan kondisi eksisting tata guna lahan, prasarana jaringan jalan, dan jumlah penduduk usia sekolah (SMP). Mengidentifikasi potensi dan masalah yang mendukung integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman.

1.7.2.1 Kerangka Analisa

Analisa data menunjukkan pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka menginterpretasikan data (tabulasi) dan peta sesuai dengan susunan kajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, disusun kerangka analisa penelitian integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman dalam ruang perkotaan, apabila dilihat dari aspek metodologi dapat dilihat pada Gambar 1.4 sebagai berikut:



GAMBAR 1.4
KERANGKA ANALISIS
INTEGRASI SEBARAN LOKASI SMP DAN SEBARAN
PERMUKIMAN DI KOTA PATI

1.7.2.2 Kebutuhan Data

.....
 Dilihat dari sumbernya, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain (Istijanto, 2006).

Data sekunder penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Sekolah yang meliputi data mengenai kondisi geografis, sebaran lokasi SMP, jumlah SMP, jaringan jalan, tata guna lahan dan sebaran permukiman.

Kebutuhan data untuk penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel IV.1 sebagai berikut:

**TABEL I.1
 KEBUTUHAN DATA PENELITIAN**

No	Analisis	Variabel	Sasaran	Jenis Data
1	2	3	4	5
1	Deskripsi sebaran permukiman	Banyaknya rumah tiap BWK	Identifikasi sebaran permukiman	Sekunder: - RUTRK Pati - Pati Dalam Angka - Margorejo Dalam Angka
2	Bufer Sebaran Lokasi SMP	Luas Jangkauan SMP dalam radius 1 Km	Mendapatkan peta jangkauan lokasi SMP.	Sekunder: - Dokumentasi jumlah SMP dan peta lokasi SMP
3	Analisis Kebutuhan SMP Berdasarkan Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Mendapatkan peta kebutuhan SMP berdasarkan anak usia sekolah	Sekunder: - Dokumentasi jumlah penduduk

Lanjutan;

1	2	3	4	5
4	Analisis Pemanfaatan Lahan	Lahan tidak terbangun yang masih tersedia	Mendapatkan peta skor pemanfaatan lahan	Sekunder: - Peta tata guna lahan
5	<i>Buffer</i> jarak jalan	Jaringan jalan	Peta skor jarak pelayanan jalan	Sekunder: Peta jaringan jalan
6	<i>Overlay</i> Peta	Integrasi Sebaran Lokasi SMP dan sebaran Permukiman	Mendapatkan Peta sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman	- Peta skor jangkauan lokasi SMP - Peta skor Kebutuhan SMP - Peta skor pemanfaatan lahan - Peta skor jarak pelayanan Jalan

Sumber : Hasil Analisis,2008

1.7.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Gulo, 2002). Sedangkan Informasi atau data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yang terdiri dari (Marzuki, 2002):

1. Data Sekunder

Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan maupun publikasi lainnya serta laporan-laporan.

2. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dilakukan melalui dokumentasi yang bersumber dari Bappeda, Dinas Pendidikan dan sekolah tentang hal-hal yang berkaitan dengan peta lokasi, jumlah sekolah, jumlah penduduk usia sekolah, tataguna lahan dan jaringan jalan.

1.7.3 Teknik Analisis

Tujuan utama analisis adalah agar data yang telah dikumpulkan dapat diolah menjadi suatu informasi yang bermanfaat dalam menjawab permasalahan penelitian (Istijanto, 2005). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana integrasi sebaran lokasi SMP dan perkembangan permukiman apabila dilihat dari pola penyebaran dan integrasinya. Oleh sebab itu, tujuan utamanya adalah mendapatkan integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di kota Pati yang akan dianalisis dengan menggunakan GIS.

GIS (*Geographic Information System*) merupakan suatu teknologi baru yang pada saat ini menjadi alat bantu (tools) yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut dan data spasial (Prahasta, 2003). GIS atau Sistem Informasi Geografis (SIG) mampu memberikan solusi terhadap analisis referensi geografis, dalam hal ini adalah pemetaan sebaran suatu lokasi yaitu lokasi SMP sebaran permukiman. Sedangkan menurut Yue-Hong Chou

(1997), “*GIS is an organized collection of computer hardware, software, geographic data, and personal designed to efficiently capture, store, update, manipulate analyze, and display all forms of geographically referenced information.*” Dengan perangkat SIG, tidak hanya sekedar untuk mempersiapkan data-data masukan dan merencanakan informasi-informasi keluaran, merancang basis data, mengimplementasikan basis data, melakukan analisis-analisis (menjawab *queries*) yang diperlukan, dan kemudian menyajikan hasil-hasil akhirnya.

Adapun teknik analisa dari studi ini adalah sebagai berikut :

1.7.3.1 Analisa Deskriptif

Dalam analisa ini peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu, dalam hal ini adalah menjelaskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati mengenai pemekaran Kota Pati yang telah melampui batas wilayah administratif sehingga sebaran permukiman yang ada memerlukan adanya integrasi lokasi fasilitas pendidikan terhadap perkembangan kota, khususnya terhadap sebaran permukiman. Terhadap data ini digambarkan dengan peta dan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

1.7.3.2 Analisa Buffer

1. Peta Jangkauan Lokasi SMP diperoleh dengan analisis sebagai berikut:

- 2.1. Daerah dengan radius 1000 m dari lokasi SMP eksisting diberi bobot nilai 1.
- 2.2. Daerah yang berada di luar jangkauan SMP diberi bobot nilai 2.
- 2.3. Buffer peta jangkauan lokasi SMP

Untuk penskoran peta jangkauan lokasi SMP dapat dijelaskan pada Tabel I. 2

TABEL I.2
SKOR JANGKAUAN LOKASI SMP EKSISTING

Keterangan	Skor
Jangkauan SMP Eksisting	1
Tidak Berada pada Jangkauan	2

Sumber : Hasil analisis penulis, 2008

2. Peta Kebutuhan SMP diperoleh dengan analisa sebagai berikut :
- 1.1. Identifikasi jumlah anak usia SMP per BWK, yaitu anak usia 13-15 tahun.
 - 1.2. Identifikasi jumlah SMP yang sudah ada di masing-masing BWK.
 - 1.3. Menghitung kebutuhan SMP per BWK, dengan rumus jumlah penduduk usia sekolah dibagi 9×40 dikurangi jumlah SMP yang sudah ada.
 - 1.4. Hasil penghitungan kebutuhan SMP, kemudian diskor dengan bobot seperti tercantum pada Tabel I.3
 - 1.5. Pembuatan Peta Kebutuhan SMP per BWK dengan warna sesuai bobot masing-masing.

TABEL I.3
SKOR KEBUTUHAN SMP

Kebutuhan SMP	Skor
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5

Sumber : Hasil analisis penulis, 2008

3. Peta Skor Pemanfaatan Lahan diperoleh dengan analisis sebagai berikut :

- 3.1. Daerah lahan terbangun diberi bobot nilai 1.
- 3.2. Daerah lahan tidak terbangun diberi bobot nilai 2.
- 3.3. Buffer peta pemanfaatan lahan.

Untuk penskoran peta pemanfaatan lahan dapat dijelaskan pada Tabel I.4

**TABEL I.4
SKOR PEMANFAATAN LAHAN**

Pemanfaatan Lahan	Skor
Daerah Terbangun	1
Daerah Tidak Terbangun	2

Sumber : Hasil analisis penulis, 2008

4. Peta Skor Jarak Pelayanan Jalan diperoleh dengan analisis sebagai berikut :

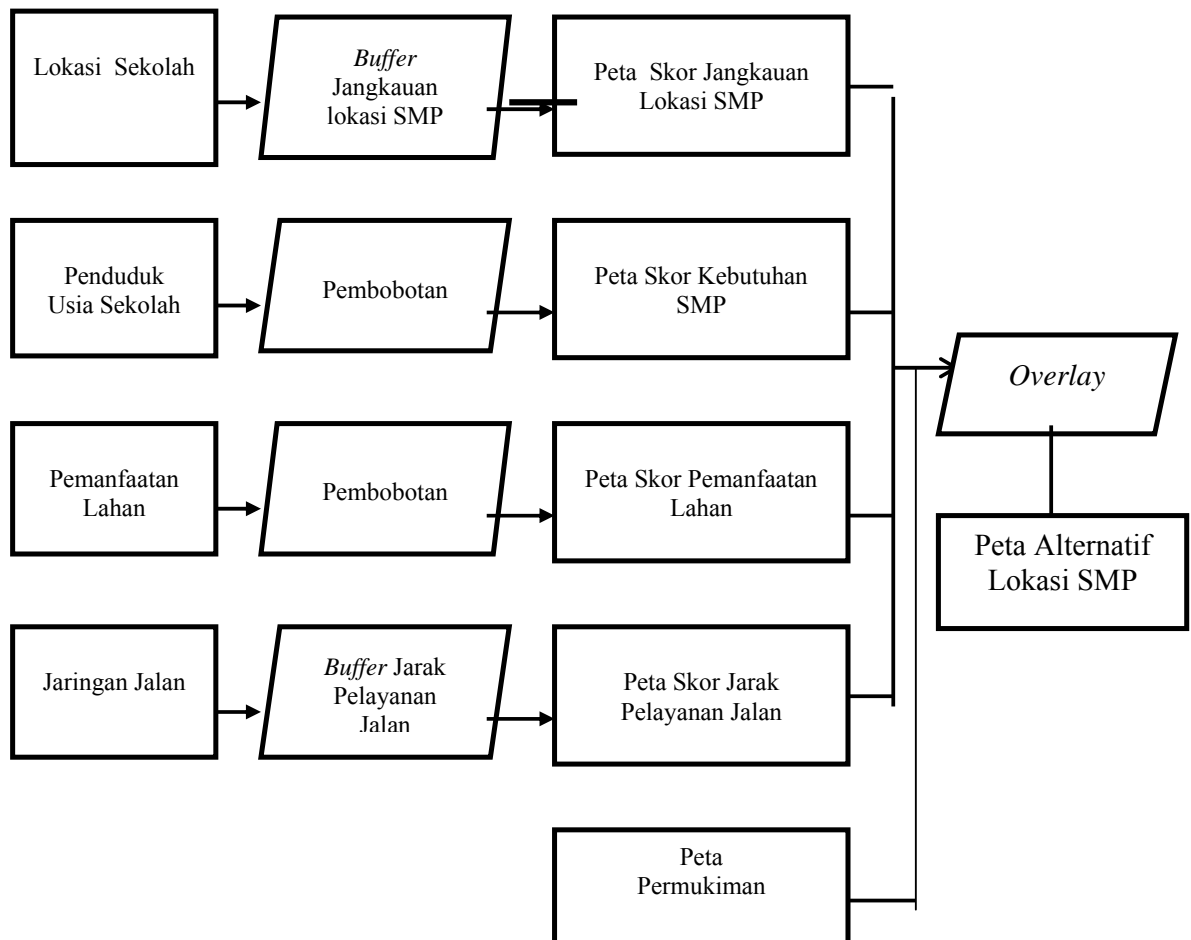
- 4.1. Bukan daerah jarak pelayanan jalan (> 300 meter) diberi bobot nilai 1.
- 4.2. Daerah jarak pelayanan jalan (300 meter) diberi bobot nilai 2.
- 4.3. Buffer peta skor jarak pelayanan jalan.

Untuk penskoran peta skor jarak dari jalan dapat dijelaskan pada Tabel I.5

**TABEL I.5
SKOR JARAK PELAYANAN JALAN**

Jangkauan Jalan	Skor
Daerah Bukan Jarak Pelayanan Jalan	1
Daerah Dalam Jarak Pelayanan Jalan	2

Sumber : Hasil analisis penulis, 2008



Sumber : Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 1.5
DIAGRAM KERJA ANALISIS *OVERLAY*

1.7.3.3. Analisa *Overlay*

Analisa *overlay* (tumpang tepat) ini adalah bagian dari basis analisis SIG dari data spasial dalam bentuk digital yang diperoleh melalui satelit atau data lain terdigitasi. Analisis *overlay* digunakan untuk menganalisis sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman. Peta yang dianalisis dengan *overlay* adalah:

1. Peta Jangkauan Lokasi SMP.
2. Peta Kebutuhan SMP.

3. Peta Penggunaan Lahan.
4. Peta Jarak Pelayanan Jalan.
5. Peta Permukiman.

Dengan menumpangtepatkan (*overlay*) peta-peta tersebut, dapat ditentukan integrasi sebaran lokasi SMP terhadap sebaran permukiman di kota Pati. Analisis *overlay* dapat disajikan dalam diagram kerja Gambar 1.5.

BAB II

INTEGRASI SEBARAN LOKASI SMP DAN SEBARAN PERMUKIMAN

2.1. Pengertian Integrasi

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dalam pasal 18 disebutkan: Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap. Hal ini ditujukan mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau disekitarnya. Pengertian integrasi secara bahasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998) adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.

Penggelembungan atau pembengkakan kota-kota (Bintarto, 1986) memunculkan istilah-istilah asing yang dikenal dengan *core region* untuk wilayah pusat dan *peripheral areas* atau *periphery* untuk daerah tepi. Daerah tepi atau daerah pinggiran adalah bagian wilayah kota yang letaknya berbatasan dengan daerah pedesaan dan intensitas wilayah terbangunnya lebih rendah dari bagian wilayah kota lainnya (Rugg, 1991). Corak kehidupannya adalah cara hidup kota atau *urban way of life*. Selanjutnya Bintarto menjelaskan bahwa paradigma yang dimaksud didasarkan pada pandangan adanya suatu sistem keruangan yang lengkap (*complete spatial sistem*) yang melihat pusat dan tepi (*core and pephery*) sebagai satu sistem.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa "integrasi" adalah sesuatu strategi pengembangan struktur tata ruang yang diupayakan untuk mendukung pola keterkaitan antar ruang berupa kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan, sehingga menjadi satu sistem kesatuan yang utuh.

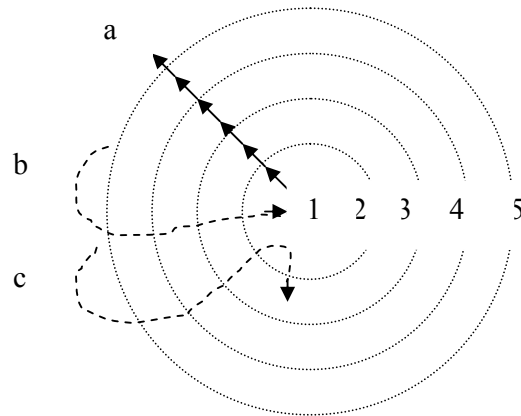
2.2. Perkembangan Kota

Kota merupakan tempat yang dipandang dan dirasakan dari berbagai sudut pandang, yang menggambarkan keaktifan, keberagaman, dan kompleksitasnya (Branch, 1995). Sedangkan menurut Hofmeister (1969) kota adalah suatu pemusatan spasial dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang kegiatan umumnya di sektor ekonomi sekunder dan tersier, dengan pembagian kerja ke dalam dan arus lalu lintas yang beraneka, antara bagian-bagiannya dan pusatnya, yang pertumbuhannya sebagian besar disebabkan oleh bertambahnya kaum pendatang yang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan barang serta jasa bagi wilayah yang jauh letaknya (Daldjoeni, 1992).

Dalam penelitian ini kota adalah merupakan perkembangan dari suatu wilayah yang terjadi akibat dari penumpukan penduduk dengan berbagai kegiatan, baik kegiatan yang bersifat ekonomi, politik maupun budaya yang makin lama berkembang makin besar.

Kemajuan teknologi yang pesat di bidang transportasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perpindahan penduduk ke luar kota. Meningkatnya standar hidup pada golongan masyarakat yang semula tinggal di dekat CBD (*Central Business District*) dan disertai dengan menurunnya kualitas lingkungan di sana memperkuat dorongan penduduk untuk pindah ke daerah-daerah pinggiran kota. Kontak personal tidak lagi harus “*face to face contact*” seperti sebelum teknologi komunikasi berkembang tetapi dapat dilakukan dengan “*faraway contact*” melalui jaringan telepon yang telah berkembang (Alonso, 1964 dalam Hadi Sabari Yunus, 2000). Hal ini dikenal dengan perkembangan daya sentripugal

yaitu suatu daya yang bergerak dari dalam kota ke luar kota atau pinggiran kota yang disebut dengan sub-urbanisasi (a). Sedangkan lawan dari daya sentripugal adalah daya sentripetal yaitu terjadinya proses perpindahan penduduk dari pinggiran atau luar kota ke dalam kota induk (daya sentripetal), daya ini sering disebut juga urbanisasi (b).



Keterangan :

1. CBD
2. Zona of transition
3. Zona of low status
4. Zona of middle status
5. Zona of high status

Sumber: Hadi Sabari Yunus, 2000

GAMBAR 2.1

PERKEMBANGAN KOTA MODEL TEORI HISTORIS

Daya tarik sentripugal merupakan proses perpindahan penduduk kota ke kawasan pinggiran kota yang disebabkan oleh faktor berikut:

1. Faktor lingkungan, seperti semakin padatnya lingkungan kota yang tidak memberikan kenyamanan hidup. Masalah ekonomi seperti semakin intensifnya penggunaan lahan untuk kegiatan fungsional kota yang lebih

produktif mendorong para pemilik lahan untuk mengubahnya dari penggunaan yang bersifat konsumtif seperti tempat tinggal menjadi kegiatan yang lebih produktif seperti perdagangan, perkantoran dan lain sebagainya.

2. Adanya daya tarik pinggiran kota atau perdesaan misalnya dari segi lingkungan, dimana masih adanya lingkungan yang sehat dan segar dibandingkan di tengah-tengah kota, masih memungkinkan tinggal di lahan yang luas sehingga kepadatan relatif rendah. Dari segi ekonomi karena harga lahan di kawasan pinggiran kota umumnya masih rendah dibandingkan dengan kawasan pusat perkotaan sehingga menarik untuk berspekulasi dalam pasaran lahan, membaiknya sistem angkutan transportasi yang memungkinkan penduduk kota untuk tinggal di kawasan pinggiran atau luar kota dan tetap bekerja dikota, terjadinya desentralisasi kegiatan perkotaan seperti dialihkannya industri kepinggiran dan lain sebagainya.

Sedangkan daya sentripetal biasanya disebabkan oleh:

1. Tekanan ekonomi yang mendorong terjadinya pergerakan ke kota misalnya menurunnya kesempatan kerja di sektor pertanian.
2. Meningkatnya daya tarik kota akibat oleh pesatnya pembangunan yang menawarkan kesempatan lapangan kerja baru dari berbagai sektor untuk peningkatan kesejahteraan serta adanya kelengkapan berbagai fasilitas pelayanan yang memberikan kemudahan dan kenikmatan.

Berkembangnya kawasan pinggiran yang diakibatkan oleh adanya gejala sub urbanisasi penduduk dan terjadinya redistribusi kegiatan tertentu dari kawasan pusat (kota induk) ke kawasan pinggiran, tentu berpotensi untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan pinggiran baik pada lokasi yang berbatasan langsung dengan kota induk maupun pada jarak yang lebih jauh lagi.

Kondisi tersebut pada akhirnya membentuk suatu keterkaitan fungsional antara kota induk dengan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan pinggiran dalam sistem perkembangan kota.

Dalam hal perkembangan kota, *Glony* berpandangan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu kota (*Glony* dalam *Woro*, 1993):

1. Faktor fisik, meliputi kondisi topografi, iklim, kondisi geologi.
2. Faktor sosial ekonomi, meliputi sebaran penduduk, tingkat kesempatan kerja, kondisi guna lahan.
3. Faktor yang berkaitan dengan aksesibilitas, kedekatan dengan pusat-pusat perkotaan dan ketersediaan jaringan transportasi.
4. Faktor ketersediaan sarana (fasilitas) dan prasarana.

2.2.1. Distribusi Spasial

Ledakan pertumbuhan penduduk adalah menjadi penyebab umum perkembangan dan pertumbuhan kota. Pertumbuhan penduduk tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kelahiran dan ditambah penduduk pendatang dari wilayah lain di sekitar ataupun dari kota-kota lainnya yang lebih kecil. Faktor yang memberikan kontribusi kepada permasalahan besar di suatu kota sangat beragam, tetapi jelas bahwa faktor pertumbuhan penduduk ini merupakan faktor utama.

Pertumbuhan penduduk ini dengan sendirinya akan menuntut peningkatan pelayanan-pelayanan kebutuhannya. Menurunnya kualitas dan kuantitas penyediaan fasilitas-fasilitas kebutuhan masyarakat di dalam kota seperti; kebutuhan perumahan, fasilitas sosial, transportasi dan lain sebagainya adalah jelas sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk kota yang membutuhkannya. Perubahan tersebut merupakan manifestasi yang sangat jelas terlihat terhadap timbulnya perubahan-perubahan kota secara fisik, dimana dibutuhkan sejumlah ruang/lahan untuk memwadahinya aktifitas sosial ekonomi

masyarakat. Ruang ini adalah tidak lain lahan perkotaan, yang justru merupakan faktor yang sangat langka dan sulit didapat di perkotaan.

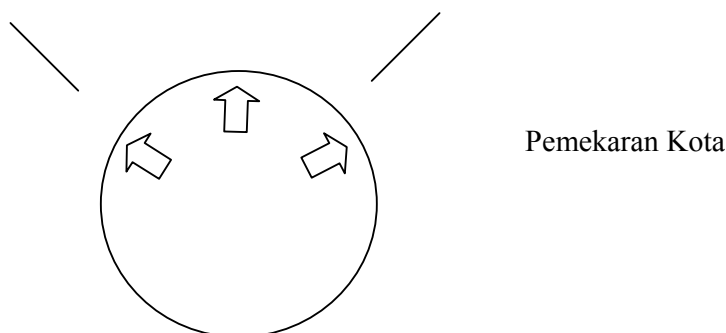
Didalam usaha pendekatan atau pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul pada suatu kota sebagai akibat dari perkembangan dan pertumbuhannya dapat diambil beberapa macam cara (Soejarto, Djoko dalam Prisma No. 6, 1976):

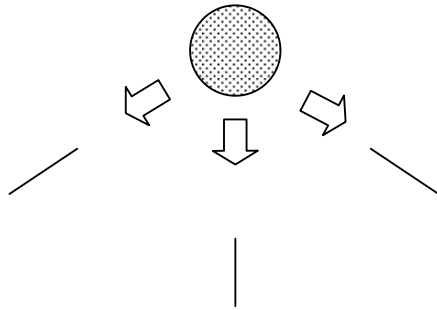
1. Rehabilitasi dan perpanjangan bagian-bagian kota yang telah terbangun.
2. Pembangunan kota secara intensif.
3. Penambahan ruang kota atau “pemekaran kota”
4. Pendekatan secara regional yaitu dengan membangun kota-kota baru.
5. Meningkatkan fungsi dan peranan kota-kota kecil yang ada di sekitar kota besar.

Beberapa cara pendekatan diatas sebenarnya dapat disingkat kedalam tiga cara pendekatan yaitu:

1. Memperluas area kota (pemekaran kota)
2. Pendekatan “dekonsentrasi planologis”
3. Menempuh kedua cara pendekatan tersebut dalam suatu kerangka regional.

Dalam hal “pemekaran kota” akan terjadi suatu perluasan kota sebagai suatu usaha mengimbangi peningkatan kebutuhan ruang kota akibat desakan perkembangan dan pertumbuhan kota. Melalui pemekaran ini dengan sendirinya beberapa wilayah lainnya yang sebelumnya bukan merupakan wilayah administrasi kota akan tergabung dan tercakup kedalam wilayah kota yang baru. Sebagai konsekuensinya pelayanan kepada daerah-daerah yang tercakup tadi kemudian pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kota tersebut.





Sumber : Sujarto, Djoko; 1976

GAMBAR 2.2 **PENDEKATAN PEMEKARAN KOTA**

”Dekonsentrasi planologis” pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk memecahkan permasalahan suatu kota dengan cara menebarkan kegiatan-kegiatan fungsional agar fungsi kota tidak terbebaskan dengan terpusat hanya kepada kota besar saja. Dengan demikian juga daya tarik suatu kota terhadap para ”calon pendatang” dari pedesaan atau kota kecil lainnya di sekitar kota besar tersebut dapat ditahan atau dieliminir. Cara pengembangan yang menggunakan pola ”dekonsentrasi planologis,” selain akan merupakan usaha pengurangan beban dan daya tarik suatu kota besar, juga berfungsi memberikan kesempatan berperannya kota-kota kecil disekitarnya sebagai pusat kegiatan baru. Konsentrasi kegiatan-kegiatan pertumbuhannya diarahkan kepada suatu tata ruang yang menyeluruh dan bukan ke arah yang membentuk suatu ‘enclave’ yang terlepas.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, konsep dekonsentrasi planologis pada dasarnya adalah konsep pengembangan pusat-pusat baru di dalam suatu wilayah metropolitan. Pengembangan pusat baru tersebut dimaksud untuk meratakan (kesempatan) perkembangan di dalam suatu wilayah. Melalui dekonsentrasi ini beban tekanan penduduk dan kegiatan yang terpusat di kota induk dapat disebarkan ke pusat-pusat baru di sekitarnya.

Jadi dengan menerapkan pendekatan konsep dekonsentrasi planologis, beban tekanan pertambahan penduduk dan kegiatan yang berpusat di kota ‘induk’ dapat disebarkan ke pusat-pusat wilayah pengembangan baru di sekitarnya. Dapat diharapkan pada langkah berikutnya, pusat-pusat baru tersebut dapat berdiri sendiri dan mampu berperan sebagai pembendung arus pendatang yang mengalir

ke kota 'induk' dan sekaligus berfungsi untuk menarik keluar penduduk yang telah bermukim di dalam kota.

Secara teoritis, pengembangan dekonsentrasi ada dua macam, yaitu pengembangan kota-kota baru (*new towns*) dan pusat-pusat pertumbuhan baru (*growth centers*). Pada prinsipnya, kedua macam pengembangan dekonsentrasi tersebut mempunyai tugas dan peranan yang sama yaitu mengurangi beban kota inti. Perbedaan yang utama terletak pada lokasi dikembangkannya pusat-pusat baru tersebut. Pengembangan kota baru dibangun selengkapnya pada daerah yang masih kosong, sedangkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru adalah pengembangan pusat-pusat yang sudah ada di sekitar kota inti (Hansen, 1972).

2.2.2. Hirarki Tempat Pusat (*Central Place*)

Teori tempat pusat dikemukakan oleh seorang analis tentang tata ruang berkebangsaan Jerman, *Walter Christaller* menerangkan bahwa tempat-tempat yang merupakan pusat kegiatan jasa tertentu seperti jasa pemenuhan kebutuhan, menunjukkan adanya hirarki aktivitas jasa dan pelayanan dari tingkat yang paling bawah yang terdapat di desa kecil, hingga kota besar (Djojodipuro. M, 1992). Berdasarkan *Christaller*, bahwa dasar penentu tempat pusat adalah suatu permukiman, yang dapat berupa kota besar, kota kecil atau suatu lingkungan. Cirinya adalah bahwa pada lokasi pusat tersebut tersedia barang-barang dan pelayanan jasa untuk wilayah yang lebih besar dari permukiman pusat itu sendiri. Secara teoritis, ada dua faktor yang menurut *Christaller* dianggap berpengaruh terhadap jumlah, luas dan tingkat kepusatan (*central place*), yakni setiap pusat hirarki pasti memiliki dua hal (Rohe. W, 1992) yaitu:

1. Batas ambang penduduk (*threshold population*) adalah minimum jumlah penduduk yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pelayanan suatu pusat sentral, atau minimum penduduk yang diperlukan untuk kelancaran *supply* barang dan jasa. Jumlah penduduk pendukung minimum suatu sarana akan berbeda untuk jumlah penduduk pendukung antar setiap jenis sarana.

2. Jangkauan pasar (*range of a good*) adalah jarak maksimal area suatu pelayanan terhadap lokasi antara tempat tinggal penduduk dengan lokasi tempat mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan, dimana penduduk masih bersedia menempuhnya. Lebih jauh dari jarak yang tersebut, mereka akan mengalihkan atau mencari tempat lain. Jadi jangkauan (*range*) merupakan jarak dari suatu tempat pelayanan dimana *demand* telah menjadi nol. Jarak jangkauan untuk suatu sarana akan berbeda dengan jarak jangkauan dari sarana lainnya tergantung pada jenis barang dan jasa yang dipasarkannya.

Bintarto (1986) menyampaikan kota sebagai suatu pusat (*central place*) menjadi pengatur dan penyalur dari pelbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya ke pelbagai daerah disekitarnya. Keadaan ini akan menimbulkan masalah bagi kota-kota atau wilayah pusat tertentu yang mempunyai daya tarik yang besar. Untuk mencegah hal ini perlu diusahakan:

1. Pengembangan wilayah-wilayah pusat yang baru, penambahan perumahan dan perluasan jalur-jalur transportasi.
2. Daerah tepi atau *peripheral areas* sebagai daerah yang menjadi sasaran dari dua arah, yaitu dari arah kota, dan dari arah desa harus segera dapat dikembangkan dengan mengatur tata guna lahannya dan mengatur daya dukungnya agar tidak terjadi permasalahan baru di daerah tepi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang dan jasa yang memiliki *threshold* besar dan range besar merupakan barang dan jasa yang dikategorikan pada hirarki yang tinggi, yang tentunya barang-barang dan jasa ini akan terdapat di kota-kota besar dengan kepadatan yang tinggi pula.

Peranan kota menjadi sangat penting fungsinya. Kota sebagai daya tarik utama terhadap penduduk di sekitarnya merupakan salah satu sebab bertambahnya penduduk kota (Mabogunje dalam Bintarto, 1986). Sebagai konsekuensinya, kegiatan fungsional dan pelayanan penduduk di kawasan pusat kota mempunyai skala yang lebih besar dan beragam yang akan menjadi daya tarik kuat bagi

penduduk dalam melakukan aktivitas maupun untuk pemenuhan kebutuhannya. Aktivitas manusia cenderung untuk melakukan kegiatan dengan usaha sekecil mungkin, akan mendasari perilaku manusia yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tindakan yang rasional untuk mencapai kepuasan dengan landasan pertimbangan sedapat mungkin meminimalkan dampak kerugian yang akan dihadapinya, sehingga jarak yang dekat merupakan daya tarik fasilitas yang ada dalam kawasan permukiman.

Lokasi fasilitas yang terpusat di kota dapat menimbulkan hambatan bagi aktivitas manusia khususnya yang berada di daerah pinggiran, karena untuk mencapai suatu lokasi dibutuhkan waktu dan biaya. Wilayah pinggiran menurut Sudjarto (1989) adalah wilayah yang timbul akibat proses pertumbuhan wilayah tertentu dengan aktivitasnya yang bersifat agraris dan non agraris yang ditandai dengan interaksi antara manusia dengan komoditasnya, sehingga wilayah pinggiran dapat pula disebut sebagai kotadesasi. Di sekeliling pusat kota terdapat bermacam-macam pemanfaatan lahan, terutama untuk perumahan dan pertumbuhan kota keluar melahirkan pinggiran yang disebut *sub urban*. Keadaan ini berdampak jarak yang ditempuh untuk mencapai suatu lokasi semakin jauh, maka semakin menurun minat seseorang untuk bepergian. Namun demikian, faktor jarak yang dekat tidak selalu dominan jika dihubungkan dengan kemajuan teknologi transportasi dan adanya perilaku tingkat kepuasan di dalam diri manusia terhadap penggunaan fasilitas sosial yang tersedia. Jika terdapat kemudahan aksesibilitas ke pusat kegiatan kota atau kawasan pusat kegiatan lokal sekitarnya tentunya akan memberikan pilihan bagi masyarakat suatu kawasan permukiman untuk mengalihkan pilihan pemenuhan kebutuhan fasilitas sosialnya.

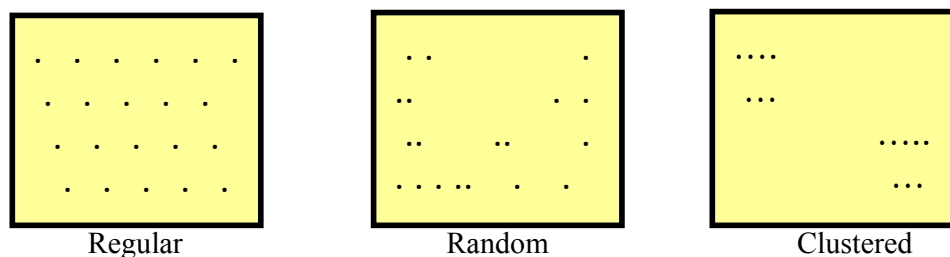
2.2.3. Permukiman Kota

Pemekaran kota dengan wilayah yang melampui batas wilayah administratif yang sebelumnya bukan merupakan wilayah administrasi kota dengan sendirinya akan memunculkan wilayah kota yang baru. Konsekuensi dari peristiwa ini adalah munculnya permukiman-permukiman baru disamping permukiman yang sudah ada. Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992

Tentang Perumahan dan Permukiman, yang dimaksud permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan yang dimaksud dengan permukiman baru adalah daerah kediaman atau hunian yang baru dibangun dalam skala besar, sebagai perluasan dari pusat kota yang ada atau pembangunan baru pada lahan milik pribadi atau perusahaan, dengan dilengkapi berbagai ragam tipe rumah, sistem transportasi lokal yang berhubungan dengan daerah pusat kota yang ada.

Perkembangan permukiman, khususnya permukiman baru cenderung berada di wilayah pinggiran atau disebut daerah sub urban. Daerah-daerah sub urban ini masih mempunyai tanah yang relatif luas dan harganya pun relatif murah. Suasana yang tenang dan belum banyak mengalami pencemaran mempunyai daya tarik tersendiri yang akhirnya dapat menimbulkan "demam pindah" ke daerah sub urban ini (Bintaro, 1986). Kondisi ini menyebabkan penyebaran permukiman berkembang ke arah pinggiran kota.

Haggett memberikan gambaran tentang pola penyebaran permukiman dalam 3 bentuk yaitu: (i) tipe regular, (ii) tipe random, dan (iii) tipe clustered (Haggett, 1968). Pola penyebaran tersebut dapat dijelaskan melalui Gambar 2.3 sebagai berikut :



Sumber: Haggett, 1968

GAMBAR 2.3 JENIS POLA PENYEBARAN

Salah satu model yang sering dimanfaatkan dalam melakukan analisis keruangan adalah analisis tetangga terdekat (*nearest-neighbour analysis*). Analisis tetangga terdekat telah dikembangkan oleh King tahun 1962 dalam analisa komparatif terhadap 20 daerah sampel di Amerika Serikat (Haggett, 1968). Pengevaluasian pola-pola ini menggunakan skala tetangga terdekat yang diungkapkan ke dalam skala R (Nilai R). Nilai R dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut (Bintarto, 1982): (i) menentukan batas wilayah yang akan diselidiki, (ii) mengubah pola penyebaran pemukiman menjadi pola titik, (iii) memberikan nomor urut bagi tiap-tiap titik untuk mempermudah analisis, (iv) mengukur jarak terdekat yaitu jarak pada garis lurus antara satu titik dengan titik lain yang merupakan tetangga terdekat, dan (v) menghitung besar parameter tetangga terdekat (*nearest-neighbour statistic*). Skala R dapat dihitung dengan rumus-rumus sebagai berikut (Sumaatmadja, 1988):

$$R = \frac{\square A}{\square E} \quad \text{-----} \rightarrow \quad \square A = \frac{\sum r}{N}$$

r = jarak tiap titik tempat ke tetangganya yang terdekat (A = aktual)

$$\square E = \frac{1}{2 \sqrt{p}}$$

= rata-rata jarak ke tetangga terdekat yang diharapkan pada penyebaran secara random dari kepadatan p

Jumlah titik tempat (N)

$$p = \frac{\text{Luas area yang diobservasi}}{\text{Luas area yang diobservasi}}$$

$$R = \frac{\sum A}{\sum E} = \frac{(2\sqrt{p}) \sum r}{N}$$

Nilai R ini berkisar di antara nol (0) sampai dengan 2, 1491. Atau dijadikan matriks menjadi :

0	0,7	1,4	2,1491
I	II	III	

I. Pola bergerombol (*cluster pattern*)

II. Pola tersebar tidak merata (*random pattern*)

III. Pola tersebar merata (*dispersed pattern*)

Masalah penggunaan lahan di daerah perkotaan sangat beragam. Dengan adanya perkembangan/pemekaran kota persaingan dalam penggunaan lahan, sangat intensif terjadi di daerah perkotaan. Persaingan dalam penggunaan lahan tersebut merupakan manifestasi yang sangat jelas terlihat terhadap timbulnya perubahan-perubahan kota secara fisik, dimana dibutuhkan sejumlah ruang/lahan untuk mewedahi aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Ruang ini adalah tidak lain lahan perkotaan, yang justru merupakan faktor yang sangat langka dan sulit didapat di perkotaan. Perencanaan tataguna lahan di daerah perkotaan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masa yang akan datang, tujuan perencanaan dan pengembangan untuk meningkatkan kemakmuran secara serasi dan seimbang. Karena permukiman adalah menyangkut ruang dan lahan yang akan melayani kebutuhan dan kegiatan manusia dalam melakukan perencanaannya (Sumaatmadja, N. 1988).

Didasari oleh lokasi dan penyebaran pola permukiman dalam ruang, *Christaller* mencari tata ruang permukiman yang paling efisien, sehingga kebutuhan untuk segenap penduduk dipenuhi melalui biaya pengangkutan yang paling murah. Untuk itu disusunnya jaringan hexagonal permukiman dan ikatan garis-garis komunikasi (Daldjoeni, N. 1992). Pusat-pusat yang lebih rendah akan berada pada titik-titik sudut heksagonal tersebut. Demikian selanjutnya sehingga akan terbentuk hirarki daerah-daerah pelayanan secara bertingkat. Jadi lokasi kegiatan yang melayani kebutuhan penduduk harus ada pada tempat yang sentral/pusat, yakni tempat yang memiliki kawasan pengaruh terhadap daerah sekitarnya (*hinterland*).

2.3. Fasilitas Kota

Ketersediaan fasilitas kota dinilai sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kota. Sebuah permukiman membutuhkan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan masyarakat kota. Pengertian-pengertian yang berkenaan dengan fasilitas, jika dikaitkan dengan permukiman adalah suatu aktivitas atau materi tersebut satu sama lain mempunyai ikatan, namun secara sistematis dapat dibagi kedalam dua kelompok utama yaitu fasilitas sosial dan fasilitas fisik (Sujarto, 1989).

Dalam perspektif pembangunan wilayah dan kota pengertian fasilitas mengarah kepada pengertian infrastruktur yang antara lain didefinisikan sebagai berikut:

- Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di bidang sosial dan ekonomi (Grigg, 1988).

- Infrastruktur adalah dasar jasa atau layanan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kegiatan industri, pertanian dan pembangunan ekonomi lainnya (Johston, 1981).
- Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Kodoatie, 2003).

Menurut Neil S. Grigg (1988), pengertian infrastruktur dalam beberapa kamus, masih mempunyai makna yang bersifat umum. Adapun struktur yang menjadi bagian-bagiannya sedang dan akan terus berkembang apabila dikaitkan dengan kebutuhan pekerjaan umum dan fisik fasilitas kota atau negara. Dengan demikian, makna infrastruktur yang selama ini masih dalam artian umum akan mengalami perkembangan sejalan dengan peran dan fungsinya.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan fasilitas kota adalah jenis-jenis fasilitas yang diisyaratkan untuk dipenuhi dalam suatu kawasan/lingkungan perumahan.

Peraturan pembangunan fasilitas Umum dan Sosial untuk diterapkan pada lingkungan perumahan mulai diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1978, kemudian diperbaharui pada tahun 1979 dan 1983. Pada tahun 1987, peraturan ini disempurnakan lagi menjadi “Petunjuk Perencanaan Kawasan Kota”, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/KPTS/1987. Secara umum materi yang dimuat dalam keempat peraturan tersebut adalah sama, tanpa perubahan pada besaran standar untuk perencanaan fasilitas umum dan sosial di

lingkungan perumahan. Dengan demikian, peraturan yang akan menjadi pegangan pada penelitian ini adalah Kepmen PU No. 378/KPTS/1987. Peraturan ini memaparkan masing-masing jenis fasilitas yang diisyaratkan untuk dipenuhi dalam suatu kawasan/lingkungan perumahan. Sesuai dengan peraturan di atas, dijelaskan mengenai fasilitas umum dan sosial yang berhubungan dengan lingkup materi dan penelitian ini.

Mengenai penggolongan fasilitas pelayanan di Indonesia, secara umum dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok (Permendagri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah), yaitu:

1. *Prasarana Lingkungan*, adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain: jalan, saluran, pembuangan limbah, serta saluran pembuangan air hujan.
2. *Utilitas Umum*, adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam area pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum, kebersihan (sampah), serta pemadam kebakaran.
3. *Fasilitas Sosial*, adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam lingkungan permukiman antara lain: fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, rekreasi kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.

Keberhasilan kehadiran suatu fasilitas umum dan sosial di kota, disamping dapat dilihat dari minat dan kesediaan para penghuni perumahan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, adalah ketersediaan fasilitas itu sendiri. Yang menjadi masalah pada sebagian besar fasilitas prasarana bukanlah pengetahuan teknisnya, tetapi keuangannya, kesenjangan antara kebutuhan prasarana yang

sebenarnya dan sumber daya keuangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Anthony 1992).

Dengan demikian penyediaan fasilitas umum dan sosial di kota, memerlukan perencanaan dan pendanaan yang memadai, sehingga pelayanan kebutuhan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

2.4. Fasilitas Pendidikan

Menurut UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan menurut Ace Suryadi & Dasim Budimansyah (2004) Pendidikan adalah sebagai barang dan jasa umum; investasi sektor pendidikan merupakan pembangunan infrastruktur publik (*public investment*) yang tidak berbeda dengan investasi pada infrastruktur umum lainnya seperti jalan, air bersih, drainase, telpon dan sebagainya. Namun jika dikaitkan dengan latar belakang penduduk yang sangat padat di perkotaan, maka penyediaan fasilitas ini harus mampu menjawab kebutuhan penduduk yang beragam.

Sebagaimana pengertian tentang fasilitas sosial yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu suatu aktivitas atau materi yang melayani masyarakat akan kebutuhan yang bersifat memberikan kepuasan sosial, mental dan spiritual. Dari

pengertian di atas dirangkum bahwa fasilitas pendidikan berarti aktivitas atau materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan yang bersifat memberikan kepuasan sosial, mental dan spiritual melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan, fasilitas ini meliputi:

- a. *Taman kanak-kanak (TK)*, yaitu sarana pendidikan paling dasar untuk anak usia 5-6 tahun. Minimum penduduk yang dapat mendukung keberadaan sarana ini 1000 penduduk dan lokasi sebaiknya berada dalam kelompok keluarga yang digabungkan dengan taman.
- b. *Sekolah Dasar (SD)*, yaitu sarana pendidikan untuk anak-anak usia 6-12 tahun. Minimum penduduk pendukung sarana ini 1600 penduduk dan lokasi sebaiknya tidak menyeberang jalan lingkungan dan masih tetap dalam lingkungan kelompok keluarga.
- c. *Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)*, yaitu sekolah untuk melayani anak-anak lulus SD. Minimum penduduk pendukung untuk pengadaan sarana ini 4800 penduduk. Letak sekolah tidak harus di pusat lingkungan dan dapat digabungkan dengan lapangan olah raga.
- d. *Sekolah Lanjutan Atas (SLA)*, yaitu sekolah untuk melayani anak-anak lulusan SMP. Minimum penduduk pendukung untuk pengadaan sarana ini 4800 penduduk dan lokasi sama dengan SLTP.

Pada jenjang pendidikan dasar, yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), tahun 2007 Direktorat Pembinaan SMP merencanakan membangun SD-SMP Satu Atap terutama di daerah-daerah terpencil, terisolasi,

dan terpencar. Pendidikan Satu Atap mencakup keterpaduan secara fisik dan pengelolaan (Depdiknas, 2007).

Pengalokasian fasilitas-fasilitas pelayanan umum perlu ditetapkan karakteristik-karakteristik target penduduk yang akan dilayani, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Adapun standar penyediaan jumlah sarana dasar khususnya Sekolah Menengah Pertama ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378 /KPTS/1987 Tanggal 31 Agustus 1987 yang telah disahkan menjadi SNI 03-6981-2004 dapat dilihat pada Tabel II.1.

TABEL II.1
STANDAR FASILITAS SOSIAL DAN EKONOMI

FASILITAS PENDIDIKAN		
JENIS	KETERANGAN	KRITERIA
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	Sarana Pendidikan yang digunakan untuk menampung lulusan Sekolah Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimum terdiri dari 6 ruang kelas masing-masing dapat menampung 40 orang. 2. Kelompok penduduk pendukung 4800 orang 3. Jangkauan maksimum 1.000 m

Sumber : Hasil Pengolahan Standar fasilitas Departemen PU (1987)

2.5. Lokasi Sekolah

Teori lokasi dapat diterapkan untuk mempelajari pola lokasi suatu fasilitas, penyebaran fasilitas dan interaksi keruangan dalam pemanfaatan fasilitas tersebut.

Hagget memberikan gambaran tentang pola penyebaran fasilitas dalam 3 bentuk yaitu: (i) tipe regular , (ii) tipe random, dan (iii) tipe clustered (Haggett, 1968).

Sedangkan lokasi tempat dalam suatu ruang dapat dideskripsikan dalam bentuk lokasi absolut dan lokasi relatif (Haggett: 1968). Lokasi absolut suatu

tempat, berkaitan posisinya menurut garis lintang dan garis bujur, adapun lokasi relatif berkaitan dengan hubungan antara tempat dengan faktor yang ada di sekitarnya.

Dalam konteks ruang perkotaan, penentuan lokasi suatu fasilitas menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu badan usaha. Penentuan lokasi yang tepat akan memberikan sejumlah keuntungan bagi suatu badan, seperti memperkuat posisi persaingan, pengadaan bahan, kemampuan pelayanan terhadap konsumen, dan sebagainya (Purnomo: 2004). Termasuk dalam kaitan ini adalah lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP). SMP adalah bentuk satuan pendidikan diatas sekolah dasar (Depdiknas, 2005). Letak suatu sekolah, diharapkan dalam suatu lokasi yang baik atau optimal. Lokasi optimal adalah lokasi yang terbaik secara ekonomis (Daldjoeni, 1992).

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional terfokus pada: (i) pemerataan dan perluasan akses, (ii) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta (iii) penguatan tata kelola (*governance*), akuntabilitas dan pencitraan publik. Terkait dengan kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang pertama, maka pemerataan dan perluasan akses menjadi hal yang sangat penting, artinya dari kalangan masyarakat mampu atau miskin semuanya bisa mendapatkan akses pendidikan secara adil, tidak ada diskriminasi dalam pelayanan pendidikan.

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, merupakan penunjang utama, maka suatu proses tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa dimanfaatkannya prasarana yang memadai. Belajar sebagai suatu proses juga membutuhkan tersedianya prasarana yang demikian. Tersedianya sarana dan

prasarana memegang peranan penting dalam belajar. Bila sarana ini tersedia dengan baik, maka variabel ini saja sudah dapat meningkatkan prestasi siswa.

Terkait dengan lokasi dan sarana dan prasarana pendidikan, ada standar-standar yang harus dipenuhi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah mengeluarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). yang dimaksud prasarana, yaitu fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah (Depdiknas, 2007).

Dalam standar sarana dan prasarana, lahan untuk lokasi suatu SMP memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel II.2.

TABEL II.2
RASIO MINIMUM LUAS LAHAN TERHADAP PESERTA DIDIK

No.	Banyak rombongan belajar	Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik (m / peserta didik)		
		Bangunan satu Lantai	Bangunan dua Lantai	Bangunan tiga Lantai
1	3	22,9	14,3	-
2	4-6	16,8	8,5	7,0

3	7-9	13,8	7,5	5,0
4	10-12	12,8	6,8	4,5
5	13-15	12,2	6,6	4,4
6	16-18	11,9	6,3	4,3
7	19-21	11,6	6,2	4,2
8	22-24	11,4	6,1	4,2
9	25-27	11,2	6,0	4,2

Sumber: Permendiknas No. 24 Tahun 2007

2. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
3. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15 % tidak berada dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
4. Lahan hendaknya terhindar dari gangguan-gangguan sebagai berikut:
 - Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - Pencemaran udara, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
5. Lahan sesuai peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari pemerintah daerah setempat.
6. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan / atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

Disamping ketentuan tentang lahan, letak suatu SMP hendaknya sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur sebuah SMP sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Ruang kelas, | 8. Ruang konseling, |
| 2. Ruang perpustakaan, | 9. Ruang UKS, |
| 3. Ruang laboratorium IPA, | 10. Ruang organisasi |
| 4. Ruang pimpinan, | 11. Jamban, |
| 5. Ruang guru, | 12. Gudang, |
| 6. Ruang tata usaha, | 13. Ruang sirkulasi, |
| 7. Tempat beribadah, | 14. Tempat bermain/Olah Raga |

Ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang diatur dalam standar yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.

2.6. Kesenjangan Kebutuhan

Fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMTA) adalah bagian dari pelayanan dasar yaitu fasilitas pelayanan dasar, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya (UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman).

Seperti dijelaskan di depan, bahwa salah satu teori lokasi yang mendasari pendistribusian lokasi adalah teori kedudukan pusat (*central place theory*) dari Walter Christaller. Teori ini menyatakan bahwa setiap kegiatan yang akan menghasilkan barang dan jasa mempunyai ambang penduduk (*threshold population*) dan jangkauan pasar. Yaitu jumlah penduduk minimum yang dibutuhkan untuk kelancaran dan kesinambungan penawaran barang. Sedangkan

jangkauan pasar (*range*) adalah jarak yang perlu ditempuh seseorang untuk mendapatkan jasa yang bersangkutan.

Pendistribusian fasilitas juga berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan penduduk dalam mengkonsumsi. Menurut Doxiadis (1968) dalam De Chiara kepuasan yang dapat diberikan oleh suatu pusat pelayanan bergantung pada jarak-waktu (*time-distance*) dan jarak-biaya (*cost-distance*). Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan dan pendistribusian fasilitas sosial, menurut Sujarto (1977), yaitu:

1. Faktor manusia yang akan mempergunakan pusat-pusat pelayanan. Faktor manusia terutama menyangkut pertimbangan-pertimbangan mengenai jumlah penduduk yang akan mempergunakan pelayanan tersebut, kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, status sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai, potensi masyarakat, pola kebudayaan dan antropologi.
2. Faktor lingkungan manusia melaksanakan kegiatan kehidupannya. Faktor lingkungan menyangkut pertimbangan mengenai skala lingkungan dalam arti fungsi dan peranan sosial ekonominya, jaringan pergerakan, letak geografis lingkungan dan sifat keterpuasan lingkungan.

Sedangkan menurut Daniels (1988), kebutuhan fasilitas sosial tergantung pada banyak faktor, faktor tersebut, yaitu: (1) ukuran daerah perencanaan; (2) jumlah populasi penduduk, kepadatan dan tingkat pertumbuhannya; (3) pendapatan lokal; (4) kapasitas dari fasilitas yang telah ada.

Lokasi penempatan fasilitas sosial mempertimbangkan kuantitas dan kualitas masyarakat penggunanya. Kualitas artinya adalah menyangkut sosio-kultural masyarakatnya, sebagai contoh bila masyarakat lebih banyak memiliki anak usia SMP, maka lebih banyak fasilitas pendidikan SMP, sedangkan kualitas adalah jumlah layanan yang sudah terlayani. Sedangkan jangkauan layanan untuk fasilitas sosial dapat diukur berdasarkan jarak capai dan area yang dilayani. Area yang dilayani tergantung pada penduduk yang akan dilayani sehingga model pelayanannya berjenjang. Sebagai gambaran, misalnya pengadaan prasarana pendidikan SMP adalah yang mampu menampung lebih banyak murid dibandingkan prasarana SD dengan persyaratan pendukung ambang (rasio 1:3) artinya satu SMP (4800 penduduk ambang) setara dengan 3 sekolah dasar (1600 penduduk ambang).

Standar penyediaan jumlah sarana dasar ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/KPTS/1987 Tanggal 31 Agustus 1987 yang telah disyahkan menjadi SNI 03-6981-2004 dapat dilihat pada tabel di atas.

Perkembangan kota yang pesat menjadi pertimbangan utama adalah memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu kata kunci "apa yang dilayani, dimana yang dilayani, seberapa besar harus dipenuhi, bagaimana cara memenuhi" merupakan hal yang harus dipahami. Perkembangan ini akan menimbulkan konsekuensi terhadap kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan, khususnya di daerah pinggiran kota. Masyarakat di daerah pinggiran kota mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dari sisi kebijaksanaan seperti di sentral kota. Di pusat kota tersedia berbagai fasilitas tidak

seperti di daerah pinggiran, terjadi infrastruktur yang belum mapan sehingga menyebabkan proses pembangunan tidak optimal.

Pembangunan daerah pinggiran kota melalui pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti penyediaan pendidikan dapat mengurangi kesenjangan. Kebutuhan memperoleh pendidikan sama dengan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan, bahkan diantaranya ada yang mengesampingkan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan demi pendidikan. Dalam konsep penyediaan sarana secara efisien dan ekonomis dalam melayani seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan yang integratif diharapkan dapat meningkatkan layanan terhadap perkembangan permukiman yang ada di daerah pinggiran, dengan memadukan semua aktifitas sosial ekonomi masyarakat secara fungsional dan spasial.

Menurut Dillinger, W, 1994, berdasarkan skenario pengembangan kota, maka beberapa langkah untuk perencanaan layanan kota yang dilakukan adalah:

- a. memperkirakan kebutuhan (*demand*)
- b. bagaimana penyediaan (*supply*) dengan mempertimbangkan daya layan, standar dan pola pelayanan saat ini
- c. strategi implementasinya yang berupa pembangunan utuh (*piece meal*) atau sepotong-sepotong (*incrementa*)

2.7. Konsep Ruang *Neighborhood Unit*

Sebagai suatu bagian komponen kota yaitu unit permukiman dalam kota maka *neighborhood unit* adalah suatu lingkungan fisik dengan batasan yang jelas, tersedia pelayanan fasilitas sosial untuk tingkat rendah, untuk melayani sejumlah

penduduk, dimana hubungan kerjasama dilandasi oleh kontrol sosial dan rasa komunitas (Porteus, 1977 dalam Suryanto, 1989)

Sebenarnya orang yang pertama kali memperkenalkan konsep *neighborhood unit* adalah Sir Ebenezer Howard (1850-1928) yang mencoba mengangkat sistem dan bentuk komunitas tradisional perdesaan sebagai komunitas ideal yang perlu dikembangkan di perkotaan. Pada kota-kota tradisional, maka kota masih terbagi dalam unit-unit kelompok rumah tinggal atau unit-unit fungsional spesifik yang homogen, yaitu dikenal sebagai *neighborhood* tradisional yang diikat oleh ikatan sosial kekerabatan. Di Indonesia, unit-unit fungsional, spesifik dan homogen tersebut juga ada bahkan sering dipakai sebagai nama unit administrasi sampai saat ini, seperti Kauman, Pajeksan, Jagalan dan lain-lain merupakan nama yang memberikan predikat fungsi spesifikasi pada tempat dan masyarakat yang tinggal didalamnya. Dalam konteks ini, *neighborhood* merupakan suatu lingkungan spesifikasi yang homogen, dengan pengikat kegiatan yang sejenis dan hubungan kekerabatan.

Neighborhood unit diadaptasi oleh Clarence Perry pada tahun 1929 sebagai suatu konsep untuk merencanakan suatu lingkungan yang berlandaskan suatu pemikiran sosial psikologis, sebagai suatu jawaban untuk mengatasi penurunan kualitas kehidupan masyarakat di negara-negara industri saat itu. Perry mengidentifikasi *neighborhood unit* sebagai suatu unit permukiman yang mempunyai batas yang jelas, yaitu: (1) diukur atas dasar keefektifan jarak jangkauan pejalan kaki dan (2) terjadinya kontak langsung individual serta ketersediaan fasilitas pendukung kebutuhan permukiman (Keating dan Krumholz, 2000).

Menurut Perry, *Neighborhood* yang ideal akan merangkum seluruh fasilitas publik dan kondisi-kondisi yang diperlukan oleh rata-rata keluarga bagi kenikmatan dan kewajaran hidup sekitar rumah mereka. Selanjutnya oleh Perry definisi di atas diuraikan dalam enam prinsip dalam merencanakan *neighborhood* (Rohe dan Gates, 1985)

1. *Size* (Ukuran), pembangunan unit tempat tinggal harus menyiapkan perumahan dengan ukuran populasi tertentu yang mensyaratkan diperlukannya

satu sekolah dasar (*elementary school*), dimana area yang diperlukan tergantung pada tingkat kepadatan populasi.

2. *Boundaries* (Batas), pada setiap sisi unit lingkungan dibatasi oleh jalan-jalan arteri dengan kelebaran yang memadai sehingga dapat dipakai sebagai lalu lintas cepat, yang tidak menembus daerah permukiman tersebut.
3. *Open Space* (Ruang terbuka), harus disediakan sistem taman dan ruang kecil yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan individu yang mendiami lingkungan perumahan tersebut.
4. *Institution Sites* (Area-area institusi), area untuk sekolah dan institusi yang melayani lingkungan perlu disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam lingkungan terbuat dan hendaknya ditempatkan secara berkelompok di sekitar sebuah titik umum atau titik pusat.
5. *Local Shops* (Pertokoan setempat), satu atau lebih pertokoan lokal yang cukup memadai bagi populasi yang dilayani, hendaknya diletakan disepertar permukiman dan lebih baik lagi disekitar pertemuan jalur-jalur lalu lintas yang mengikat beberapa lingkungan.
6. *Internal Street System* (Sistem jalan internal), setiap unit perlu dilengkapi dengan sistem jalur khusus, sehingga setiap jalan raya disesuaikan dengan beban lalu-lintas yang mungkin dan jaringan jalan sebagai suatu keseluruhan dirancang untuk memudahkan sirkulasi di dalam lingkungan tersebut, dan hendaknya dicegah penggunaan sebagai jalur lalu-lintas cepat.

Dengan konsep *neighborhood unit* itu, dapat disimpulkan bahwa *Perry* mempunyai tujuan utama bagi sebuah lingkungan permukiman yang baik adalah untuk membuat interaksi sosial di antara penghuni lingkungan permukiman,

sedangkan penataan fisik lingkungan merupakan cara untuk mencapai tujuan utama tersebut (Golany, 1976). Ada beberapa prinsip atau kaidah dalam penentuan perencanaan pembentukan unit *neighborhood* yang lebih baik (Golany, 1984 dalam Ujianto 1994), yaitu:

1. Prinsip *Social Integrity*, terjadinya kesatuan ikatan sosial kemasyarakatan.
2. Prinsip *Social Identity*, terjadi ciri khusus serta tumbuhnya identitas sosial kemasyarakatan.
3. Prinsip *Social Governance*, terjadinya pengaturan dan pengelolaan (swakelola dalam pengaturan unit hunian).
4. Prinsip *Sharing System*, terjadinya tukar menukar pelayanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari pusat-pusat pelayanan yang ada di lingkungannya.
5. Prinsip *Self Containment*, terjadinya pemenuhan kebutuhan (sehari-hari) bagi warga huniannya oleh pusat pelayanan yang ada di lingkungannya.

Sedangkan untuk menjamin dapat terlaksananya konsep *Neighborhood unit*, *Clarence Perry* membuat ketetapan untuk terpenuhinya kebutuhan sosio-psikologis permukiman. Syarat-syarat tersebut adalah: (1) memiliki jarak layanan yang mudah dicapai dengan berjalan kaki, dimana daya jangkau jarak layanan efektif setiap fasilitas pelayanan sosial akan mempengaruhi ukuran *neighborhood*; (2) Jumlah warga, yaitu ukuran jumlah anggota menghasilkan suatu ukuran kepadatan yang memungkinkan tingkat ikatan fisik dan area komunitas tetap tinggi, dengan tetap menjaga keseimbangan dengan daya dukung alam.

Dengan merangkum berbagai definisi yang telah dipaparkan maka disimpulkan, maka *neighborhood* merupakan unit fisik (*formal entity*) dan sekaligus sebagai unit sosial (*functional entity*). Sedangkan oleh *Perry*, konsep mengenai *neighborhood unit* merupakan alat untuk merencanakan lingkungan permukiman atas dasar kebutuhan sosio psikologi.

2.8. Rangkuman Kajian Teori

Dari kajian teori di atas maka dapat disimpulkan dan dikaitkan dengan penelitian integrasi sebaran lokasi SMP dan perkembangan permukiman di Kota Pati seperti di lihat pada tabel II.3 berikut ini:

TABEL II. 3
RANGKUMAN KAJIAN TEORI INTEGRASI SEBARAN LOKASI
DAN PERKEMBANGAN PERMUKIMAN

No.	Sumber	Uraian	Kaitan dengan Penelitian	Variabel
1	Walter Christaller (1966). Daldjoeni (1988) Sujarto (1977) Bintarto (1986) UU No. 4 Th 1992	a. Tata ruang permukiman yang paling efisien. b. Daerah sub urban memiliki daya tarik.	Identifikasi sebaran Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Sebaran Permukiman.
2	Alonso (1964) Bintarto (1986) Permendiknas No.24 Th. 2007	. Daerah sub urban memiliki daya tarik.karena lahan masih luas dan murah	Memberikan arahan perkembangan kota yang mengarah pada penyediaan sarana dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan lahan
3	Daldjoeni (1988) Haggett (1968) Permendiknas No.24 Th. 2007 Christaller (1966). Bintarto (1982) Perry (1929)	a. Sebaran lokasi b. Lokasi optimal sekolah c. Standar Sarana dan Prasarana sekolah d. Jangkauan pasar (<i>range of a good</i>)	Menentukan jangkauan lokasi sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak SMP • Jumlah SMP
4	Walter Christaller (1966). Kepmen PU No. 378 / KPTS / 1987 SNI 03-6981-2004 Dillinger, W, 1994 Perry (1929)	a. Batas ambang penduduk (<i>threshold population</i>) b. Satu SMP memiliki minimum 6 ruang kelas yang dapat menampung 40 orang dengan penduduk pendukung 4800 jiwa	Menentukan batas ambang penduduk untuk pembangunan suatu fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk usia sekolah
5	Sujarto (1977)	Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan dan pendistribusian fasilitas sosial.	Mengidentifikasi jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak dari jalan terhadap fasilitas layanan
6	Walter Christaller (1966). Daldjoeni (1988)	Pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud ditujukan untuk	Menetapkan integrasi sebaran lokasi SMP dan	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi sebaran lokasi SMP

	<p>Sujarto (1977) Bintarto (1986) UU No. 4 Th 1992 Alonso (1964) Bintarto (1986) Permendiknas No.24 Th. 2007 Kepmen PU No. 378 / KPTS / 1987</p>	<p>mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau disekitarnya</p>	<p>sebaran permukiman</p>	<p>dan sebaran permukiman</p>
--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Analisis,2008

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA PATI

3.1. Kondisi Perwilayah Kota Pati

Seperti umumnya kota-kota di Indonesia, Kota Pati berperan sebagai ibukota kabupaten, pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi. Kondisi Kota Pati yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Pati sangat mendukung peranan tersebut di atas. Kedudukan Kota Pati dalam skala regional cukup strategis dalam pengembangan perwilayahan Kabupaten Pati maupun Provinsi Jawa Tengah. Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah dalam lingkup regional Kota Pati ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan cepat Juwana-Pati. Kawasan pertumbuhan cepat Juwana- Pati bertumpu pada sektor industri, perikanan dan pertanian. Kota Pati, juga termasuk dalam kawasan kerja sama strategis Wanarakuti (Juwana-Jepara-Kudus-Pati) dengan kota-kota utama Kudus, Pati dan Jepara. Letaknya yang cukup dekat dengan Kota Semarang merupakan jalur yang harus dilalui arus barang dan jasa dari arah timur menuju Semarang. Juga merupakan jalur regional Semarang-Surabaya yang menunjang peranan Kota Pati sebagai sub transit regional.

Wilayah Kota Pati yang luasnya 5.250 Ha, terdiri atas wilayah makro dan mikro. Wilayah makro adalah daerah–daerah yang mendapatkan pengaruh dari perkembangan kota Pati, yaitu Kecamatan Pati dan Margorejo. Sedangkan wilayah mikro terdiri atas kelurahan/desa yang masuk kedalam kawasan perkotaan Pati, yaitu 22 kelurahan/desa di Kecamatan Pati dan 9 desa di

Kecamatan Margorejo dibagi menjadi 4 Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu:

1. BWK Pusat Kota, wilayahnya meliputi Kelurahan Pati Wetan, Pati Kidul, Plangitan, Puri, Winong ,Ngarus, Pati Lor, Parenggan, Kalidoro.
2. BWK I, wilayahnya meliputi Kelurahan Sidokerto, Sukoharjo, Muktiharjo dan sebagian Desa Badegan.
3. BWK II, wilayahnya meliputi Kelurahan Gajahmati, Mustokoharjo, Semampir, Sidoharjo, Sarirejo, Geritan, Dengkek, Sugiharjo, Widorokandang, Kutoharjo.
4. BWK III, wilayahnya meliputi Kelurahan Panjunan, Blaru, Sukokulon Jimbaran, Ngawen, Margorejo, Penambuhan, Langenharjo, Dadirejo.

Untuk lebih jelasnya, Bagian Wilayah Kota dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Adapun fungsi dari kelurahan/desa yang masuk kedalam masing-masing BWK adalah seperti pada Tabel III.1 di bawah ini.

TABEL III.1
FUNGSI BAGIAN WILAYAH KOTA PATI

BWK Pusat Kota	BWK I	BWK II	BWK III
<ul style="list-style-type: none"> • Kantor pelayanan pemerintahan skala kabupaten • Perdagangan dan jasa skala regional • Pendidikan skala regional • Pemukiman perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas olah raga dan rekreasi skala kabupaten • Fasilitas sosial dan ekonmi skala pelayana BWK • Pengembangan permukiman perkotaan • Pertanian Perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas kesehatan skala regional • Kawasan militer • Industri • Fasilitas sosial dan ekonmi skala pelayana BWK • Pengembangan permukiman perkotaan • Pertanian Perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas transportasi skala regional • Industri • Fasilitas sosial dan ekonmi skala pelayana BWK • Pengembangan permukiman perkotaan • Pertanian Perkotaan

Sumber :Diolah dari RUTRK Pati Tahun 2005

3.2. Tata Guna Lahan Eksisting

Pola penggunaan lahan di Kota Pati dibedakan menjadi beberapa aktivitas penggunaan lahan. Penggunaan lahan di Kota Pati didominasi peruntukan sebagai lahan basah atau lahan sawah yaitu seluas 3005 Ha, sedangkan penggunaan lahan kering (bukan lahan sawah) seluas 2245 Ha.

Secara keseluruhan pola penggunaan lahan di kota Pati masih didominasi oleh aktivitas pertanian. Hal ini dapat dilihat dari besarnya proporsi lahan pertanian di Kota Pati. Kawasan pertanian khususnya sawah irigasi teknis merupakan salah satu hambatan tersendiri dalam pengembangan kawasan perkotaan. Oleh karena itu perkembangan kota harus dilakukan secara efektif, pola pengembangan aktivitas ekonomi sebaiknya diperhitungkan dengan baik, karena akan menarik aktivitas lainnya seperti permukiman. Pemanfaatan lahan tidak mengorbankan lahan-lahan pertanian yang produktif.

Penggunaan lahan untuk kegiatan permukiman dan komersial masih terpusat pada daerah pusat kota. Kegiatan perdagangan dan jasa masih memusat pada beberapa ruas jalan utama dan simpul-simpul jalan di Kota Pati. Pola penggunaan lahan ini tentunya kurang optimal dalam menopang pertumbuhan Kota Pati. Penyebaran permukiman, aktivitas perdagangan dan jasa juga mulai berkembang menuju daerah pinggiran kota, namun perkembangannya masih secara linier mengikuti jalan regional yang ada di Kota Pati. Penggunaan lahan di Kota Pati per BWK secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel III.2. dan Gambar 3.2 berikut ini :

TABEL III.2.
PENGUNAAN LAHAN PER BWK DI KOTA PATI
TAHUN 2007

NO	BWK	Luas Wilayah (Ha)	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	
				Pekarangan	Tegal, dll
1	2	3	4	5	6
1	BWK Pusat Kota, meliputi : Pati wetan, Pati Kidul, Plangitan, Puri, Winong, Ngarus, Pati Lor, Parenggan, Kalidoro	601	82	456	63
2	BWK I, meliputi : Sidokerto, Sukoharjo, dan Muktiharjo	985	408	267	310
3	BWK II, meliputi : Gajahmati, Mustokoharjo, Semampir, Sidoharjo, Sarirejo, Geritan, Dengkek, Sugiharjo, Widorokandang, Kutoharjo	1482	961	93	428
4	BWK III, meliputi : Panjunan, Blaru, Sukokulon, Jimbaran, Ngawen, Margorejo, Penambuhan, Langenharjo, Dadirejo	2182	1554	431	197
JUMLAH		5250	3005	1582	663

Sumber: Diolah dari Kecamatan Pati dan Margorejo Dalam Angka 2008

Pengembangan Kota Pati lebih lanjut dipertimbangkan untuk menarik aktivitas perkotaan ke daerah yang belum maju. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru atau dengan memindahkan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam kota. Dengan memanfaatkan pembangunan jalan lingkar aktivitas-aktivitas perkotaan yang lebih membutuhkan akses ke jalan regional dapat dikembangkan mendekati jalan lingkar Kota Pati.

3.3. Kependudukan

3.3.1. Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pati tahun 2007 sebanyak 116.800 jiwa. Dengan luas wilayah 5.250 hektar maka tingkat kepadatannya mencapai 22 jiwa/Ha. Penduduk tersebut tersebar di 31 kelurahan/desa, dengan jumlah dan tingkat

kepadatan yang bervariasi. Distribusi penduduk dan tingkat konsentrasi kepadatan penduduk sangat penting dalam penelitian ini, agar dapat diketahui tingkat hirarki pemukimannya berdasarkan tingkat kepadatan. Sedangkan distribusi kepadatan digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran penduduk di Kota Pati berdasarkan luas wilayah kota dan luasan terbangun.

Kepadatan kotor (bruto) diketahui berdasarkan luasan wilayah desa, yang digunakan untuk mengetahui secara umum daya tampung kawasan apakah masih mencukupi atau tidak. Sedangkan kepadatan bersih (*netto*) diketahui berdasarkan luasan lahan terbangun, yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsentrasi penduduk. Kepadatan penduduk Kota Pati secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut ini:

TABEL III.3.
KEPADATAN PENDUDUK PER DESA / KELURAHAN
DI KOTA PATI TAHUN 2007

NO	Desa / Kelurahan	Luas Wil (Ha)	Luas Pekar (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan	
					Kotor (Jiwa/Ha)	Bersih (Jiwa/Ha)
BWK Pusat Kota						
1	Pati Wetan	27	25	3496	129	139
2	Pati Kidul	94	83	7556	80	91
3	Plangitan	85	39	3389	40	87
4	Puri	109	87	5926	54	68
5	Winong	111	79	6889	62	87
6	Ngarus	30	20	2162	72	108
7	Pati Lor	84	78	7800	93	100
8	Parenggan	27	23	2353	87	102
9	Kalidoro	34	22	2252	66	102
BWK I						
1	Sidokerto	279	102	4921	18	48
2	Sukoharjo	377	96	5529	15	58
3	Muktiharjo	329	69	7010	21	101
BWK II						

1	Gajahmati	153	19	2132	14	112
2	Mustokoharjo	47	20	1383	29	69
3	Semampir	41	18	1465	36	81
4	Sidoharjo	83	28	2618	31	93
5	Sarirejo	221	67	4865	22	73
6	Geritan	104	31	1538	15	50
7	Dengkek	127	20	2419	21	130
8	Sugiharjo	238	66	2475	10	35
9	Widorokandang	167	32	1728	10	53
10	Kutoharjo	301	132	9863	33	75
BWK III						
1	Panjunan	208	68	3519	17	52
2	Blaru	91	31	3264	36	105
3	Sukokulon	268	45	2250	8	50
4	Jimbaran	199	30	2091	11	69
5	Ngawen	233	38	2214	10	58
6	Margorejo	490	79	4737	10	60
7	Penambuhan	217	47	2956	14	63
8	Langenharjo	249	45	2798	11	62
9	Dadirejo	237	58	3202	14	55
Jumlah/Rata-rata		5250	1582	116.800	35	79

Sumber: Diolah dari Kecamatan Pati dan Margorejo dalam angka 2008

Berdasarkan tabel di atas diketahui kepadatan penduduk di kota pati sebagai berikut:

- Rata-rata kepadatan kotor kota Pati adalah sebesar 35 jiwa/Ha. Desa/kelurahan dengan kepadatan yang lebih tinggi dari rata-rata tersebut adalah Desa Pati Wetan.
- Desa Pati Wetan adalah Desa yang paling padat, yaitu 129 jiwa/Ha. Sedangkan angka kepadatan penduduk kotor paling terendah terdapat pada desa Sukokulon 8 jiwa/Ha.
- Rata-rata kepadatan bersih kota Pati adalah 79 jiwa/ha. Wilayah-wilayah dengan kepadatan yang lebih tinggi dari rata-rata tersebut adalah Pati Wetan, Pati Kidul, Plangitan, Winong, Ngarus, Pati Lor, Parenggan,

Kalidoro, Muktiharjo, Gajahmati, Semampir, Sidoharjo, Dengkek, Blaru sebagai wilayah yang paling padat desa Pati Wetan yaitu 139 jiwa/Ha. Sedangkan angka kepadatan penduduk bersih paling terendah terdapat pada desa Sugiharjo dengan angka kepadatan 35 jiwa/Ha.

3.3.2. Penduduk Usia Sekolah

Penduduk usia sekolah pada jenjang SMP adalah adalah jumlah penduduk yang berusia antara 13–15 tahun di masing-masing desa/kelurahan per BWK.. Penduduk usia sekolah pada jenjang SMP ini adalah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Penduduk usia peserta didik SMP secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.4.

TABEL III.4
BANYAKNYA PENDUDUK USIA PESERTA DIDIK SMP
DI KOTA PATI TAHUN 2008

NO	Desa / Kelurahan	Penduduk Usia 13-15		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	BWK Pusat Kota	1.153	1.139	2.292
1	Pati Wetan	95	96	191
2	Pati Kidul	208	206	414
3	Plangitan	90	96	186
4	Puri	162	163	325
5	Winong	194	184	378
6	Ngarus	67	51	118
7	Pati Lor	210	216	426
8	Parenggan	65	65	130
9	Kalidoro	62	62	124
	BWK I	230	222	452
1	Sidokerto	141	129	270
2	Sukoharjo	60	55	115
3	Muktiharjo	29	38	67
	BWK II	857	817	1.674
1	Gajahmati	59	57	116

2	Mustokoharjo	39	37	76
3	Semampir	41	40	81
4	Sidoharjo	74	70	144
5	Sarirejo	136	131	267
6	Geritan	43	42	85
7	Dengkek	67	66	133
8	Sugiharjo	69	67	136
9	Widorokandang	49	46	95
10	Kutoharjo	280	261	541
BWK III		789	765	1.554
1	Panjunan	98	96	194
2	Blaru	92	88	180
3	Sukokulon	57	56	113
4	Jimbaran	85	82	167
5	Ngawen	62	64	126
6	Margorejo	116	112	228
7	Penambuhan	86	97	183
8	Langenharjo	76	55	131
9	Dadirejo	117	115	232
Jumlah/Rata-rata		3.029	2.943	5.972

Sumber: Data Wajar Dikdas Kab. Pati 2008

3.4. Jaringan jalan

Kota Pati merupakan kota yang tumbuh di jalan arteri primer “Pantai Utara Jawa” (Pantura) Jakarta-Semarang-Surabaya. Jalan Pantura ini memiliki peranan yang penting dalam menunjang pergerakan barang/penumpang dari satu kota ke kota lainnya. Padatnya lalu lintas yang melewati jalan Pantura telah membawa keuntungan bagi perkembangan kota-kota yang dilalui, termasuk kota Pati. Jalan arteri primer Pantura memiliki dampak pada beberapa fungsi regional tumbuh di sepanjang jalan tersebut, seperti rumah makan, industri, bengkel, *rest area*, terminal barang dan lain-lain.

Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun menjelaskan bahwa jalan sebagai prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagiannya termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan, sistem jaringan jalan terbagi menjadi 2, yaitu: sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Jalan arteri primer memiliki tipikal pergerakan regional, sehingga posisi kota Pati yang terletak di sepanjang jalan arteri primer, sulit dihindarkan dari percampuran pergerakan lalu lintas lokal-regional. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan perlu pengaturan peruntukan lahan di jalan-jalan yang berfungsi menghubungkan Kota Pati dengan daerah/kota lain.

Pola jaringan jalan di kota Pati adalah lingkaran dua arah dan *radial concentric* (lingkaran dengan jari-jari di tengahnya), sebagai sistem transportasi dasar, jaringan jalan lingkaran dua arah dan *radial concentric* di Kota Pati yang menjadi urat nadi transportasi adalah sebagai berikut:

a. Jalur Lingkaran Dalam

Jalur lingkaran dalam ini adalah jalur yang melingkari lingkungan pusat kota yang berfungsi sebagai jalur penampung dan pembagi arus di pusat kota.

Jalan yang masuk dalam kategori jalan ini adalah: Jl. Diponegoro, Jl. Kembangjoyo, Jl. Kyai Ageng Selo, Jl. Juru Mertani.

b. Jalur Lingkaran Luar

Yang menjadi penampung arus kegiatan regional yang masuk dari jalan radial. Fungsinya menampung arus lalu lintas internal ke Eksternal atau sebaliknya. Jalur ini sangat penting untuk membebaskan daerah pusat kota dan arus kendaraan berat atau bus-bus antar kota. Jalan Lingkaran Luar ini sedang dalam pengerjaan.

c. Jalur Konsentrik

Sebagai konsentrik regional terdapat 5 jalur yakni ke Semarang, ke Surabaya, ke Tlogowungu, ke Tayu/Jepara, ke Purwodadi. Jalur ini sebagai distributor arus lalu lintas dari ke wilayah regional.

Jalur lingkaran dan radial di atas merupakan pola utama dan pengembangan jalur transportasi Kota Pati. Sedangkan secara lingkungan masih dikembangkan lagi jalur-jalur lingkungan yang dibedakan antara pola jaringan di pusat kota dan wilayah sekitarnya sebagai jalur-jalur kolektor lingkungan/jalur antar lingkungan. Sedangkan menurut hirarkinya, jalan-jalan di Kota Pati dikelompokkan menjadi jalan arteri, kolektor dan lokal. Peta jaringan jalan secara jelas dapat disajikan pada Gambar 3.3

3.5. Sarana Transportasi

3.5.1. Terminal

Sebagai kawasan perkotaan yang tumbuh di jalan arteri, terminal merupakan sarana transportasi yang penting, yaitu meliputi:

- Terminal Penumpang Regional

Terminal penumpang ini terdapat 1 lokasi, yaitu Terminal Kembangjoyo berperan sebagai terminal angkutan antar kota dan terminal angkutan pedesaan.

- Terminal Angkutan Barang: Terminal angkutan barang terdapat 1 lokasi di Margorejo, terminal ini sebagai tempat bongkar muat barang dan sarana pendukung kegiatan industri. Disamping terminal angkutan barang, di

Margorejo juga muncul “ *rest area* “ yang sekaligus juga sebagai terminal angkutan barang.

- Terminal Angkutan Kota

Terminal angkutan kota terdapat 2 lokasi, yaitu di Terminal Kembangjoyo dan Terminal Puri, terminal ini memiliki peranan penting dalam mendukung pergerakan penumpang antar kawasan dalam kota.

- Halte

Halte terdapat 3 lokasi, yaitu Halte Puri, Halte Gemeces dan Halte Plangitan, halte ini berfungsi untuk penampung sementara penumpang sebelum perpindahan angkutan.

3.5.2. Moda transportasi

Moda transportasi sebagai sarana angkutan regional maupun lokal yang berperan di Kota Pati adalah Bus dan Minibus yang melayani angkutan regional serta minibus dan *pick up* untuk jenis angkutan kota dan pedesaan melayani angkutan lokal. Di Kabupaten Pati sarana transportasi paling lengkap dan jumlahnya paling banyak adalah Kota Pati. Hal ini karena Kota Pati sebagai pusat aktivitas Kabupaten Pati. Trayek angkutan umum yang terdapat di kota Pati meliputi angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.

3.6. Sebaran Lokasi SMP

Fasilitas sarana pendidikan SMP di Kota Pati, saat ini ada 15 sekolah, terdiri dari 10 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta. Lokasi fasilitas sarana SMP sebagian besar terpusat di BWK Pusat Kota, yaitu terdapat 11 unit SMP, yang terdiri dari 6 unit SMP negeri dan 5 unit SMP swasta.

Strategi pengembangan sistem sarana prasarana, diarahkan untuk dapat mewujudkan pertumbuhan di seluruh wilayah kota sesuai dengan potensi dan kendalanya serta pemenuhan pelayanan kebutuhan yang efektif dan efisien. Rencana pengembangan sarana dan prasarana pendidikan meliputi penyediaan gedung dan lahan sekolah serta sarana penunjangnya, diharapkan mampu memberikan pelayanan dasar bagi penduduk kota.

Secara geografis sebaran lokasi SMP di Kota Pati dapat disajikan dalam Gambar 3.5. Sedangkan keadaan SMP Negeri dan Swasta di Kota Pati seperti Tabel III.3.5 dan Tabel III.6.

TABEL III.5
DATA SMP NEGERI DAN SWASTA DI KOTA PATI
KEADAAN TAHUN 2008

No	Nama sekolah	STATUS		A l a m a t		
		N	S	Jalan. No	Desa	Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7
1	SMPN 1 Pati	V		Jl. P.Sudirman No.287	Kalidoro	Pati
2	SMPN 2 Pati	V		Jl.Ronggowarsito Gg.7	Plangitan	Pati
3	SMPN 3 Pati	V		Jl. R.Sugiyono No.17	Winong	Pati
4	SMPN 4	V		Jl. P. Sudirman No.18	Puri	Pati
5	SMPN 5	V		Jl. P. Sudirman	Plangitan	Pati
6	SMPN 6	V		Jl. Kustin	Sidokerto	Pati
7	SMPN 7	V		Jl. Pati-Tayu Km. 3	Kutoharjo	Pati
8	SMPN 8	V		Jl. RA. Kartini No. 1	Pati Lor	Pati
9	SMPN Nasional		V	Jl. KH. A. Dahlan Gg Tjg.	Plangitan	Pati
10	SMP Keluarga		V	Jl. P. Sudirman No.152	Pati Kidul	Pati
11	SMP Purnama		V	Jl. Ronggowarsito Gg VII	Plangitan	Pati

12	SMP Muhamadiyah		V	Jl. RA. Kartini No.14	Pati Lor	Pati
13	SMP IT ITT		V	Jl. P. Dipoengoro No.155	Pati Lor	Pati
14	SMPN 1 Margorejo	V		Jl. Langenharjo	Langenharjo	Margorejo
15	SMPN 2 Margorejp	V		Jl. Ds. Badegan	Badegan	Margorejo

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2008

Sedangkan jumlah siswa, jumlah rombongan belajar dan luas lahan untuk masing-masing SMP di Kota Pati adalah sebagai berikut:

TABEL III.6
JUMLAH SISWA, ROMBONGAN BELAJAR DAN LUAS LAHAN SMP
DI KOTA PATI
KAADAAN TAHUN 2007

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Rombongan Belajar	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 PATI	721	19	5.250
2	SMPN 2 PATI	762	18	7.352
3	SMPN 3 PATI	753	22	6.234
4	SMPN 4 PATI	716	15	4.542

Lanjutan;

1	2	3	4	5
5	SMPN 5 PATI	627	15	4.542
6	SMPN 6 PATI	603	15	5.674
7	SMPN 7 PATI	680	17	6.765
8	SMPN 8 PATI	717	18	4.545
9	SMPN Nasional	405	10	3.676
10	SMP Keluarga	260	7	3.254
11	SMP Purnama	125	3	2.650
12	SMP Muhamadiyah	76	3	2.436
13	SMP IT ITT	36	3	2.345
14	SMPN 1 Margorejo	607	14	6750
15	SMPN 2 Margorejp	713	18	6640

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2007

3.7. Permukiman

Permukiman di Kota Pati masih terpusat pada BWK Pusat Kota dan

terletak pada beberapa ruas jalan utama dan simpul-simpul jalan di Kota Pati. Namun pemekaran kota, pertumbuhan penduduk, dan adanya gejala sub urbanisasi penyebaran permukiman mulai berkembang menuju daerah pinggiran kota. Dari BWK Pusat Kota penyebaran permukiman mulai berkembang menuju daerah pinggiran kota, namun perkembangannya masih bersifat sporadis dan secara linier mengikuti jalan regional yang ada di Kota Pati. Pola permukiman di daerah pinggiran yang mengikuti secara linier jalur jalan regional menyebabkan terjadinya pergeseran atau mengikuti tren, semula berfungsi sebagai lahan pertanian, saat ini banyak lahan pertanian yang berubah untuk beberapa fungsi regional yang tumbuh di sepanjang jalan tersebut, seperti rumah makan, industri, bengkel, *rest area*, terminal barang dan lain-lain.

Di daerah pinggiran kota tumbuh permukiman-permukiman baru, meskipun perkembangannya masih secara linier mengikuti jalan regional yang ada di Kota Pati, seperti permukiman baru di Desa Muktiharjo (Perumahan Rondole Indah, Perumahan Sekar Rukun), Desa Kutoharjo, Desa Sarirejo, Desa Puri, Desa Sukoharjo dan permukiman baru di Gunung Bedah. Sebaran permukiman secara nyata dapat dilihat dari jumlah rumah masing-masing desa/kelurahan, seperti tertera pada Tabel III.7 dan pada Gambar 3.10 di bawah ini:

TABEL III.7
BANYAKNYA RUMAH DAN RATA-RATA JIWA PER RUMAH
DI KOTA PATI TAHUN 2007

NO	Desa / Kelurahan	Jumlah Rumah	Jumlah Jiwa	
			Seluruhnya	Perjiwa
	BWK Pusat Kota			
1	Pati Wetan	992	3.496	4
2	Pati Kidul	2.062	7.556	4

3	Plangitan	836	3.389	4
4	Puri	1.563	5.926	4
5	Winong	1.889	6.889	4
6	Ngarus	642	2.162	3
7	Pati Lor	1.947	7.800	4
8	Parenggan	671	2.353	4
9	Kalidoro	617	2.252	4
BWK I				
1	Sidokerto	1.231	4.921	4
2	Sukoharjo	1.439	5.529	4
3	Muktiharjo	2.178	7.010	3
BWK II				
1	Gajahmati	661	2.132	3
2	Mustokoharjo	378	1.383	4
3	Semampir	409	1.465	4
4	Sidoharjo	732	2.618	4
5	Sarirejo	1.226	4.865	4
6	Geritan	499	1.538	3
7	Dengkek	708	2.419	3
8	Sugiharjo	811	2.475	3
9	Widorokandang	512	1.728	3
10	Kutoharjo	2.626	9.863	4
BWK III				
1	Panjunan	952	3.519	4
2	Blaru	947	3.264	3

Lanjutan;

3	Sukokulon	693	2.250	3
4	Jimbaran	573	2.091	3
5	Ngawen	617	2.214	3
6	Margorejo	1.395	4.737	3
7	Penambuhan	1.030	2.956	3
8	Langenharjo	834	2.798	3
9	Dadirejo	922	3.202	3
Jumlah/Rata-rata		32.592	115.191	4

Sumber : Diolah dari Kecamatan Pati dan Margorejo dalam angka 2008

3.8. Arah Kebijakan Pembangunan

Dengan mempertimbangkan nilai lokasional, dan kegiatan-kegiatan yang sudah berkembang wilayah Kota Pati dibagi menjadi 4 Bagian Wilayah Kota

(BWK) yaitu BWK Pusat Kota ; wilayahnya meliputi Kelurahan Pati Wetan, Pati Kidul, Plangitan, Puri, Winong, Ngarus, Pati Lor, Parenggan, Kalidoro. BWK I: wilayahnya meliputi Kelurahan Sidokerto, Sukoharjo, Muktiharjo dan sebagian Desa Badegan. BWK II: wilayahnya meliputi Kelurahan Gajahmati, Mustokoharjo, Semampir, Sukoharjo, Sarirejo, Geritan, Dengkek, Sugiharjo, Widorokandang, Kutoharjo. BWK III: wilayahnya meliputi Kelurahan Pajunan, Blaru, Sukokulon Jimbaran, Ngawen, Margorejo, Penambuhan, Langenharjo, Dadirejo.

Sesuai Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati Tahun 2005 – 2014, pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk di dalamnya adalah fasilitas pendidikan diarahkan untuk mengoptimalkan tingkat pelayanan tiap-tiap fasilitas dengan mengelompokkan skala pelayanan fasilitas, maka tingkat pelayanan fasilitas umum dan sosial dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan kota.

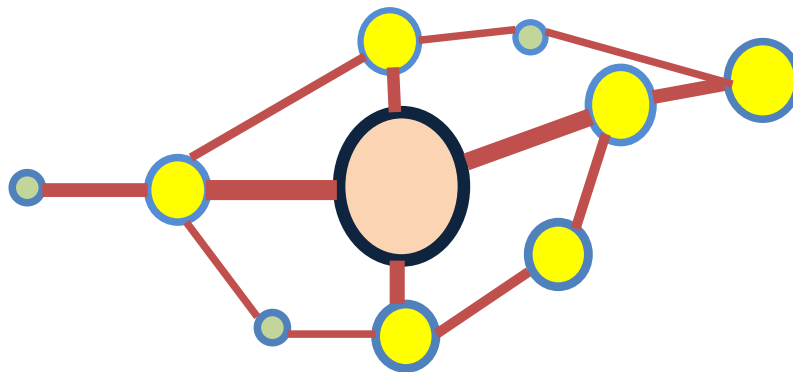
Selain itu dengan adanya pengelompokan ini akan membentuk pola ruang secara keseluruhan. Di samping mengoptimalkan tingkat pelayanan fasilitas, diperlukan juga pengembangan fasilitas-fasilitas baru kearah pinggiran kota sehingga dapat tercipta pola struktur ruang yang sudah direncanakan.

Struktur tata ruang kota memanfaatkan jalur arteri primer sebagai jalur utama. Jalan arteri primer sebagai jalur yang menghubungkan Kota Semarang-Surabaya, membentuk pola jaringan jalan kota yang dikembangkan berbentuk radial konsentrik (pola jalan melingkar dengan beberapa jari-jari yang bertemu di kawasan pusat kota). Jalan radial dimanfaatkan sebagai jalur regional sedangkan jari-jarinya sebagian berfungsi sebagai jalan dalam kota dan sebagian berfungsi sebagai penghubung antara Kota Pati dengan kota/daerah lainnya. Dengan bentuk radial konsentrik, maka penyebaran kegiatan bisa merata kearah pinggiran kota.

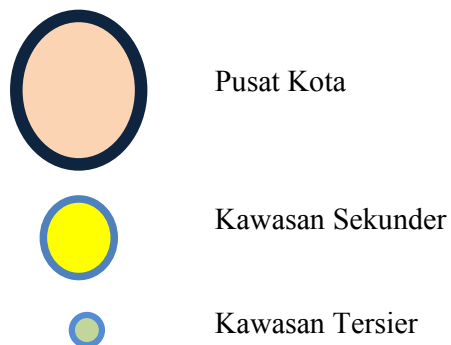
Jaringan jalan di Kota Pati cukup memadai, karena prasarana jalan dalam kondisi yang baik dengan ruas jalan yang memadai dan beraspal.

Seperti tertera pada RUTRK Pati Tahun 2005-2014, kawasan terbangun Kota Pati mengarah kepada bentuk *fragmented cities*, artinya:

- Areal perkotaan tumbuh terpisah (enclaves) dengan kota induknya akibat lahan pertanian.
- Kenampakan kawasan baru dikelilingi areal pertanian, namun terhubung dengan kota induknya.



Keterangan :



Sumber: Revisi Rencana Induk Kota Pati, 2005-2014.

GAMBAR 3.6
KOTA BERBENTUK *FRAGMENTED CITIES*

Memperhatikan potensi kondisi eksisting dan pentingnya keterkaitan pengembangan wilayah dengan daerah sekitarnya, maka konsep pengembangan kota diarahkan sebagai berikut:

- Mengarahkan wilayah Kota Pati menjadi wilayah pengembangan kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pertanian dan pendidikan.
- Mengembangkan pusat pelayanan perkotaan yang mampu mendorong kegiatan dalam rangka otonomi daerah dan peran dalam mendukung keterkaitan desa-kota.
- Mengurangi konflik ruang antar kegiatan fungsional dengan selalu memperhatikan kelestarian sumber daya.
- Mengembangkan pusat pelayanan strategis terutama kawasan sekunder untuk penguatan pusat-pusat Bagian Wilayah Kota.

Konsep di atas, diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mendukung upaya penyebaran, perkembangan dan pertumbuhan sebaran lokasi strategis dan lingkungan terbangun di Kota Pati tanpa meninggalkan karakteristik Kota Pati.

Strategi pengembangan struktur ruang diupayakan dapat dilakukan untuk mendukung pola keterkaitan antar ruang berupa kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan.

Beberapa faktor yang diperhatikan dalam pengembangan struktur tata ruang kota antara lain:

- Struktur ruang yang terbentuk.
- Ketersediaan dan rencana jaringan prasarana.
- Kegiatan potensial setiap kawasan.

Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah Kota Pati secara lebih spesifik dimaksudkan untuk mengarahkan sistem pusat-pusat permukiman sesuai dengan hirarki dan fungsinya. Strategi tersebut diarahkan dalam konteks pengembangan wilayah kota yang terintegrasi dengan memacu pengembangan pusat-pusat kegiatan kota.

Strategi pengembangan pusat pelayanan diarahkan untuk lebih memantapkan dan memperjelas hirarki berdasarkan kondisi nyata kawasan-kawasan dan tetap memperhatikan tata jenjang pelayanan yang lebih tinggi tingkatannya dengan tujuan pemerataan pusat-pusat pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Hirarki pusat-pusat pelayanan diarahkan pada terwujudnya pengembangan wilayah secara merata. Peningkatan peran pusat pelayanan yang dikembangkan dapat dilakukan dengan melalui penyediaan sarana dan prasarana kota. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut disesuaikan dengan peran dan fungsi kota dan sekaligus penarik aktivitas.

BAB IV

ANALISIS INTEGRASI SEBARAN LOKASI SMP DAN SEBARAN PERMUKIMAN DI KOTA PATI

4.1 Analisis Sebaran Permukiman

Kedudukan Kota Pati terletak pada posisi yang cukup strategis dalam pengembangan perwilayahan Kabupaten Pati maupun Propinsi Jawa Tengah. Letaknya yang cukup dekat dengan Kota Semarang merupakan jalur yang harus dilalui arus barang dan jasa dari arah timur menuju Semarang. Juga merupakan jalur regional Semarang-Surabaya yang menunjang peranan Kota Pati sebagai sub transit regional. Kota Pati berperan sebagai ibukota kabupaten merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi melayani skala besar untuk wilayah kabupaten, kecamatan, kota dan desa.

Perkembangan Kota Pati berdampak pada perkembangan sektor-sektor ekonomi di Kota Pati saat ini, telah menyebabkan perkembangan kawasan fisik terbangun. Bahkan pengembangan yang terjadi telah meluas hingga keluar batas administrasi kota (RUTRK Pati 2005-2014). Perkembangan tersebut di atas, dewasa ini mengarah pada kawasan pinggiran kota, sehingga penyebaran pusat-pusat permukiman tersebar ke daerah pinggiran, seperti Perumahan Gunung Bedah Permai, Perumahan Sukoharjo, Perumahan Rondole Indah, Perumahan Sekar Kurung di Kecamatan Margorejo dan Perumahan Kutoharjo Permai,

Perumahan Wijaya Kusuma, Perumahan Puri Indah, Perumahan Winong Permai di Kecamatan Pati.

Sebaran permukiman dapat dilihat dari segi spasial. Melalui metode analisis deskriptif seperti yang dikemukakan oleh W.Gulo (2002) bahwa penelitian ini didasarkan pada pertanyaan dasar yang kedua, yaitu *bagaimana*. Kita tidak puas bila hanya mengetahui apa masalahnya secara eksploratif, tetapi ingin mengetahui juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

Pola permukiman di BWK Pusat Kota yaitu meliputi Kelurahan Pati Wetan, Pati Kidul, Plangitan, Puri, Winong, Ngarus, Pati Lor, Parenggan, dan Kalidoro. Dapat dilihat dalam segi ruang (*space*). Melalui pendekatan tetangga terdekat (*nearest-neighbour analysis*), seperti yang dikemukakan oleh teori King (1962) bahwa parameter tetangga terdekat R dapat ditunjukkan dengan rangkaian kesatuan untuk perbandingan antar pola titik. Hasil pola permukiman kota dengan perhitungan tetangga terdekat untuk pola permukiman di BWK Pusat Kota menyatakan bahwa parameter tetangga terdekat (nilai R) adalah **1,795** berarti pola permukiman di BWK Pusat Kota adalah tersebar merata (*dispersed pattern*). Ciri-ciri yang dapat dilihat dari hasil observasi wilayah, BWK Pusat Kota merupakan wilayah yang didominasi penggunaan lahannya sebagai lahan terbangun. Sebagai wilayah yang menjadi pusat pelayanan pemerintahan, ekonomi dan sosial, BWK Pusat Kota berfungsi melayani skala besar untuk wilayah kabupaten, kecamatan, kota dan desa. Dengan luas wilayah 601 Ha terdiri lahan terbangun 456 Ha (75,87%) lahan tidak terbangun 145 Ha (24,13%) jumlah penduduknya 41.823 jiwa, disamping untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, dan niaga,

pemerintahan dan pelayanan umum, rekreasi kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, jumlah rumah 11.219 unit dengan rata-rata 4 jiwa.

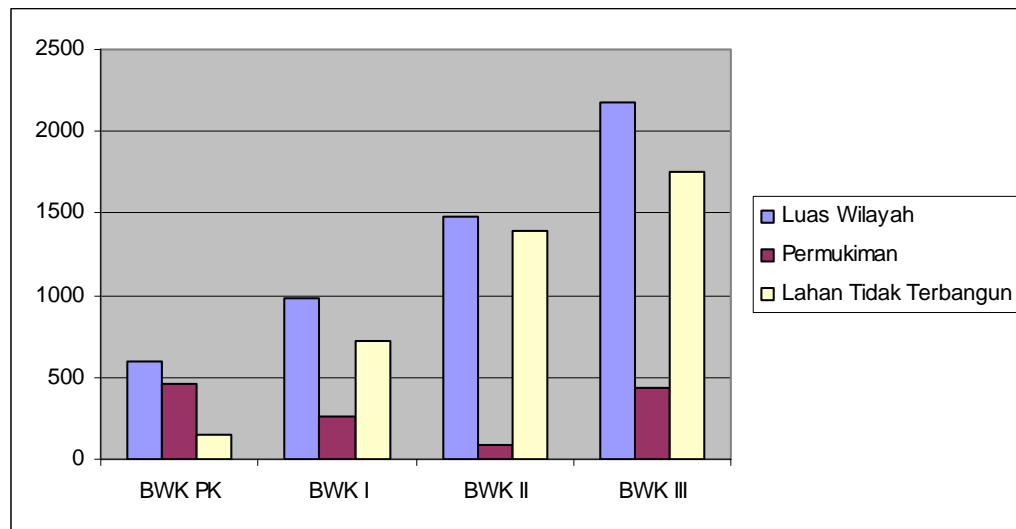
Dari BWK Pusat Kota penyebaran permukiman mulai berkembang menuju daerah pinggiran kota, namun perkembangannya masih bersifat sporadis dan secara linier mengikuti jalan regional yang ada di Kota Pati. Pola permukiman di daerah pinggiran yang mengikuti secara linier jalur jalan regional menyebabkan terjadinya pergeseran atau mengikuti trend, semula berfungsi sebagai lahan pertanian, saat ini banyak lahan pertanian yang berubah untuk beberapa fungsi regional yang tumbuh di sepanjang jalan tersebut, seperti rumah makan, industri, bengkel, rest area, terminal barang dan lain-lain.

Pola permukiman di BWK I wilayahnya meliputi Kelurahan Sidokerto, Sukoharjo, Muktiharjo dan sebagian Desa Badegan dengan perhitungan tetangga terdekat (*nearest-neighbour analysis*) untuk pola permukiman di BWK I menyatakan bahwa parameter tetangga terdekat (nilai R) adalah **1,312** berarti pola permukiman di BWK I adalah tersebar tidak merata (*random pattern*), akibat dari lahan pertanian. BWK I memiliki fungsi wilayah fasilitas olah raga dan rekreasi, sosial ekonomi, permukiman dan pertanian perkotaan serta merupakan wilayah homogenitas dengan ciri-ciri yang didominasi peruntukan lahan sebagai pertanian dan perkebunan. Dengan luas wilayah 985 Ha, lahan yang terbangun 267 Ha (27,10 %), sedangkan lahan tidak terbangun 718 Ha (72,90 %) terdiri dari lahan sawah, tegal/kebun dan kolam/tambak. Jumlah penduduk 17.460 jiwa memiliki jumlah rumah sebanyak 4.848 unit, maka rata-rata per rumah adalah 4 jiwa.

Pola permukiman di BWK II wilayahnya meliputi Kelurahan Gajahmati, Mustokoharjo, Semampir, Sidoharjo, Sarirejo, Geritan, Dengkek, Sugiharjo, Widorokandang, Kutoharjo dengan perhitungan tetangga terdekat (*nearest-neighbour analysis*) untuk pola permukiman di BWK II menyatakan bahwa parameter tetangga terdekat (nilai R) adalah **1,32** berarti pola permukiman di BWK II adalah tersebar tidak merata (*random pattern*), akibat dari lahan pertanian. BWK II memiliki fungsi wilayah fasilitas kesehatan, militer, industri, sosial ekonomi, permukiman dan pertanian perkotaan serta merupakan wilayah homogenitas dengan ciri-ciri yang di dominasi peruntukan lahan sebagai pertanian dan perkebunan. Dengan luas wilayah 1842 Ha lahan yang terbangun hanya 93 Ha (6,27 %), sedangkan lahan tidak terbangun 1389 Ha (93,73 %) terdiri dari lahan sawah, tegal/kebun dan kolam/tambak. Jumlah penduduk 30.486 jiwa memiliki jumlah rumah 8.562 unit, maka rata-rata perumahan adalah 4 jiwa. Di wilayah BWK II terdapat perumahan baru yaitu, di Desa Kutoharjo dan Desa Sarirejo.

Pola permukiman di BWK III meliputi Kelurahan Panjunan, Blaru, Sukokulon Jimbaran, Ngawen, Margorejo, Penambuhan, Langenharjo, Dadirejo dengan perhitungan tetangga terdekat (*nearest-neighbour analysis*) untuk pola permukiman di BWK III menyatakan bahwa parameter tetangga terdekat (nilai R) adalah **0,889** berarti pola permukiman di BWK III adalah tersebar tidak merata (*random pattern*), akibat dari lahan pertanian. BWK III memiliki fungsi wilayah fasilitas transportasi, industri, sosial ekonomi, permukiman dan pertanian perkotaan serta merupakan wilayah homogenitas dengan ciri-ciri yang di dominasi peruntukan lahan sebagai lahan pertanian dan perkebunan Dengan luas wilayah

2182 Ha lahan yang terbangun hanya 431 Ha (19,75 %), sedangkan lahan tidak terbangun 1.751 Ha (80,25 %) terdiri dari lahan sawah, tegal/kebun dan kolam/tambak. Jumlah penduduk 27.031 jiwa memiliki rumah sebanyak 7963 unit, maka rata-rata perumahan adalah 3 jiwa.



GAMBAR 4.1
PERBANDINGAN PERMUKIMAN DAN LAHAN MASING-MASING
BWK

4.2. Analisa Jangkauan Lokasi SMP

Secara teoritis, salah satu faktor yang menurut *Christaller* dianggap berpengaruh terhadap tingkat kepusatan (*central place*), yaitu: jangkauan pasar (*range of a good*) adalah jarak maksimal area suatu pelayanan terhadap lokasi antara tempat tinggal penduduk dengan lokasi tempat mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan, dimana penduduk masih bersedia menempuhnya. Lebih jauh dari jarak yang tersebut, mereka akan mengalihkan atau mencari tempat lain. Jadi jangkauan (*range*) merupakan jarak dari suatu tempat pelayanan dimana *demand* telah menjadi nol. Jarak jangkauan untuk suatu sarana akan berbeda dengan jarak

jangkau dari sarana lainnya tergantung pada jenis barang dan jasa yang dipasarkannya.

Pola penyebaran sekolah (SMP) di Kota Pati dapat di analisis melalui pendekatan keruangan (spasial). Metoda kuantitatif untuk menghitung pola penyebaran sekolah sebagai fasilitas sosial adalah analisis tetangga terdekat (*nearest-neighbour analysis*). Dalam teori King (1962) disebutkan bahwa parameter tetangga terdekat R (*Values for R*) dapat ditunjukkan dengan rangkaian kesatuan (*continuum*) untuk perbandingan antar pola titik.

Analisis semacam ini memerlukan data tentang jarak (dalam garis lurus) antara satu sekolah dengan sekolah lain yang menjadi tetangga terdekatnya. Tiap lokasi sekolah dianggap sebagai sebuah titik dalam suatu ruang. Jarak setiap pasang diukur, selanjutnya dijumlahkan. dengan perhitungan tetangga terdekat (*nearest-neighbour analysis*) untuk pola sebaran sekolah di BWK Pusat Kota yaitu memiliki 11 unit SMP dari 15 unit SMP yang ada di Kota Pati, menyatakan bahwa parameter tetangga terdekat (nilai R) adalah **0,885** berarti pola sekolah di BWK Pusat Kota adalah tersebar tidak merata (*random pattern*). Sedangkan di BWK I memiliki 1 unit SMP, BWK II dengan penduduk usia sekolah yang besar hanya memiliki 1 unit SMP dan BWK III memiliki 2 unit SMP.

Sedangkan jangkauan lokasi SMP, seperti disebutkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor No. 378/KPTS/1987 Tanggal 31 Agustus 1987 yang telah disahkan menjadi SNI 03-6981-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan, bahwa salah satu standar fasilitas sosial dan ekonomi khususnya fasilitas pendidikan

SMP jangkauan maksimum adalah 1 km, maka dalam penelitian ini *buffer* jangkauan layanan SMP ditetapkan 1 km atau 1000 m.

Berdasarkan sebaran lokasi SMP negeri dan swasta yang ada di Kota Pati seperti terlihat dalam Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar SMP terkonsentrasi di BWK Pusat Kota. Dengan memperhatikan peta tersebut diatas terlihat bahwa jangkauan lokasi SMP sejauh radius 1 km berdampak bahwa adanya *overlapping* jangkauan lokasi SMP yang berdekatan. Jika jangkauan lokasi SMP dibuatkan *buffer* sejauh 1 km, dapat dilihat bahwa semua permukiman di BWK Pusat Kota tersebut masuk ke dalam jangkauan lokasi SMP sehingga penduduk di permukiman tersebut dapat memilih SMP mana yang disenangi. Namun dari pada itu *buffer* jangkauan lokasi SMP yang ditetapkan 1 km maka akan terlihat masih ada beberapa permukiman khususnya di wilayah pinggiran kota BWK II dan BWK III tidak termasuk kedalam jangkauan lokasi SMP. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel IV.1, dan Gambar 4.2 berikut ini:

TABEL IV.1
JANGKAUAN LOKASI SMP DI KOTA PATI

No.	SMP	JANGKAUAN LAYANAN (desa/kelurahan)
1	2	3
1.	SMP N 1 PATI	1. Pati Wetan 2. Pati Kidul 3. Sidoharjo 4. Kalidoro 5. Ngarus 6. Pati Lor 7. Parenggan 8. Semampir
2.	SMP N 2 PATI	1. Blaru 2. Pati Kidul 3. Plangitan 4. Puri 5. Ngarus 6. Pati Lor
3.	SMP N 3 PATI	1. Ngarus 2. Pati Kidul 3. Winong 4. Puri 5. Pati Lor 6. Sidokerto 7. Muktiharjo

4.	SMP N 4 PATI	1. Ngarus 2. Pati Kidul 3. Plangitan 4. Puri	5. Sukoharjo
5.	SMP N 5 PATI	1. Ngarus 2. Pati Kidul 3. Plangitan 4. Puri	5. Winong
6	SMP N 6 PATI	1. Sidokerto 2. Winong	
7	SMP N 7 PATI	1. Kutoharjo	
8.	SMP N 8 PATI	1. Pati Wetan 2. Pati Kidul 3. Parenggan 4. Puri	5. Winong 6. Pati Lor
9	SMP NASIONAL PATI	1. Pati Wetan 2. Pati Kidul 3. Plangitan 4. Puri	5. Ngarus 6. Pati Lor 7. Parenggan 8. Kalidoro
10	SMP KELUARGA PATI	1. Pati Wetan 2. Pati Kidul 3. Plangitan 4. Kalidoro	5. Ngarus 6. Pati Lor 7. Parenggan
11	SMP PURNAMA PATI	1. Pati Wetan 2. Pati Kidul 3. Plangitan 4. Puri	5. Ngarus 6. Pati Lor 7. Parenggan

Lanjutan;

1	2	3	
12	SMP MUHAMADIYAH PATI	1. Pati Wetan 2. Pati Kidul 3. Parenggan 4. Puri	5. Pati Lor
13	SMP IT PATI	1. Pati Wetan 2. Pati Kidul 3. Parenggan 4. Puri	5. Ngarus 6. Pati Lor
14	SMP N 1 MARGOREJO	1. Margorejo 2. Sebagian Badegan	
15	SMP N 2 MARGOREJO	1. Langgenharjo 2. Panjunan 3. Dadirejo	
7.	TIDAK MASUK DALAM JANGKAUAN LOKASI SMP YANG ADA	1. Sukokolon 2. Jimbaran 3. Ngawen 4. Widorokandang	5. Sebagian Muktiharjo 6. Sebagian Sukoharjo 7. Sugiharjo

Sumber: Hasil Analisis, 2009

4.3. Analisa Kebutuhan SMP Berdasarkan Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Berbasis BWK

Pembangunan suatu unit SMP dibatasi oleh batas ambang minimum penduduk yang harus dilayani, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan membangun fasilitas SMP pada suatu tempat adalah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat khususnya anak usia sekolah di wilayah tersebut agar mendapat kemudahan dalam melanjutkan kejenjang pendidikan SMP. Bahkan sekarang ini telah banyak didirikan SMP satu atap dengan SD khususnya di daerah-daerah yang jauh jangkauannya.

Di Kota Pati fasilitas sarana pendidikan SMP terpusat di BWK Pusat Kota, karena sebagian besar fasilitas sarana SMP (73,33 %) berada di BWK Pusat Kota, di BWK I sarana SMP ada 1 unit (6,66 %), BWK II ada 1 unit SMP (6,66 %) dan BWK III ada 2 unit SMP (13,33 %).

Salah satu teori lokasi yang mendasari pendistribusian lokasi adalah teori kedudukan pusat (*central place theory*) dari Walter Christaller. Teori ini menyatakan bahwa setiap kegiatan yang akan menghasilkan barang dan jasa mempunyai ambang penduduk (*threshold population*). Yaitu jumlah penduduk minimum yang dibutuhkan untuk kelancaran dan kesinambungan penawaran barang. Sedangkan untuk menjamin dapat terlaksananya konsep *Neighborhood unit*, *Clarence Perry* membuat ketentuan untuk terpenuhinya kebutuhan sosio-psikologis permukiman. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah jumlah warga, yaitu ukuran jumlah anggota menghasilkan suatu ukuran kepadatan yang memungkinkan tingkat ikatan fisik dan area komunitas tetap tinggi, dengan tetap menjaga keseimbangan dengan daya dukung alam.

Terkait dengan jumlah penduduk minimum yang dibutuhkan telah terbit Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor No. 378/KPTS/1987 Tanggal 31 Agustus 1987 yang telah disahkan menjadi SNI 03-6981-2004, bahwa salah satu standar fasilitas sosial dan ekonomi khususnya fasilitas pendidikan SMP, bahwa sebuah SMP sekurang-kurangnya memiliki 6 rombongan belajar yang masing-

masing dapat menampung 40 orang. Mengingat jumlah penduduk usia sekolah (SMP) yang cukup besar, dalam penelitian ini penulis menghitung kebutuhan pembangunan fasilitas SMP dengan standar memiliki 9 rombongan belajar untuk menampung 40 orang.

Berdasarkan penghitungan tersebut di atas, analisa kebutuhan sekolah (SMP) per BWK di Kota Pati dapat dilihat dalam Tabel IV.2 dan Gambar 4.3

TABEL IV.2
KEBUTUHAN SMP BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK USIA
SEKOLAH (SMP) BERBASIS BWK DI KOTA PATI TAHUN 2008

No.	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah SMP Eksisting	Kebutuhan SMP
BWK Pusat Kota		2.292	11	0
1	Pati Wetan	191		
2	Pati Kidul	414		
3	Plangitan	186		
4	Puri	325		
5	Winong	378		
6	Ngarus	118		
7	Pati Lor	426		
8	Parenggan	130		
9	Kalidoro	124		
BWK I		452	1	1
1	Sidokerto	270		
2	Sukoharjo	115		
3	Muktiharjo	67		
BWK II		1.674	1	4
1	Gajahmati	116		
2	Mustokoharjo	76		
3	Semampir	81		
4	Sidoharjo	144		
5	Sarirejo	267		
6	Geritan	85		
7	Dengkek	133		
8	Sugiharjo	136		
9	Widorokandang	95		
10	Kutoharjo	541		

BWK III		1.554	2	3
1	Panjunan	194		
2	Blaru	180		
3	Sukukulon	113		
4	Jimbaran	167		
5	Ngawen	126		
6	Margorejo	228		
7	Penambuhan	183		
8	Langenharjo	131		
9	Dadirejo	232		
Jumlah/Rata-rata		5.972	15	8

Sumber: Data Wajar Dikdas Kabupaten Pati 2007

4.4. Analisa Pemanfaatan Lahan

Lahan di Kota Pati yang seluas 5.250 Ha, pola pemanfaatan lahannya meliputi lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri lahan permukiman beserta sarana dan prasarananya (30,13 %) dan lahan tidak terbangun meliputi lahan pertanian seperti sawah, tegal/kebun dan tambak/kolam (69, 87 %).

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan permukiman dan komersial masih terpusat pada BWK Pusat Kota. Kegiatan perdagangan dan jasa masih memusat pada beberapa ruas jalan utama dan simpul-simpul jalan di Kota Pati. Penyebaran permukiman, aktivitas perdagangan dan jasa juga mulai berkembang menuju daerah pinggiran kota, namun perkembangannya masih secara linier mengikuti jalan regional yang ada di Kota Pati. Pola permukiman di daerah pinggiran yang mengikuti secara linier jalur jalan regional menyebabkan terjadinya pergeseran atau mengikuti trend semula berfungsi sebagai lahan pertanian, saat ini banyak lahan pertanian yang berubah untuk beberapa fungsi regional yang tumbuh di sepanjang jalan tersebut, seperti rumah makan, industri, bengkel, rest area, terminal barang dan lain-lain.

Dengan prosentase lahan tidak terbangun yang cukup besar (69,87) memberikan fleksibilitas pembangunan fasilitas kota termasuk fasilitas pendidikan. Lokasi sebuah SMP tentunya memerlukan lahan kosong atau lahan tidak terbangun, oleh karena itu dalam analisis pemanfaatan lahan, untuk lahan tidak terbangun diberi skor 2, sedangkan lahan terbangun diberi skor 1. Peta skor pemanfaatan lahan dapat dilihat pada Gambar 4.4

4.5. Analisa Jarak Pelayanan Jalan Terhadap Lokasi SMP

Keberadaan fasilitas pendidikan SMP selain dibatasi oleh batas ambang minimum jumlah penduduk yang harus dilayani, juga terkait dengan aksesibilitas. Artinya keberadaan sarana fasilitas SMP harus dapat dengan mudah dicapai dari seluruh desa. Untuk menuju suatu pusat layanan diperlukan penunjang

aksesibilitas yang antara lain adalah adanya jaringan jalan. Lokasi SMP sebagai pusat layanan pendidikan akan didatangi peserta didik sebagai pengguna layanan jika untuk menuju SMP tersebut tersedia sarana yang memudahkan aksesibilitas. Masalah sirkulasi kota merupakan persoalan yang membutuhkan pemikiran mendasar, antara prasarana jalan yang tersedia, bentuk struktur kota, fasilitas pelayanan umum.

Pola persebaran jaringan jalan di Kota Pati memanfaatkan jalur arteri primer sebagai jalur utama. Jalan arteri primer sebagai jalur yang menghubungkan Kota Semarang-Surabaya, membentuk pola jaringan jalan kota yang dikembangkan berbentuk radial konsentrik (pola jalan melingkar dengan beberapa jari-jari yang bertemu di kawasan pusat kota). Jalan radial dimanfaatkan sebagai jalur regional sedangkan jari-jarinya sebagian berfungsi sebagai jalan dalam kota dan sebagian berfungsi sebagai penghubung antara Kota Pati dengan kota/daerah lainnya. Dengan bentuk radial konsentrik, maka penyebaran kegiatan bisa merata ke semua wilayah.

Kota Pati merupakan kota yang tumbuh di jalan arteri primer “Pantai Utara Jawa” (Pantura) Jakarta-Semarang-Surabaya. Jalan Pantura ini memiliki peranan yang penting dalam menunjang pergerakan barang/penumpang dari satu kota ke kota lainnya. Jalan arteri primer memiliki tipikal pergerakan regional, sehingga posisi kota Pati yang terletak di sepanjang jalan arteri primer, berimplikasi pada kualitas pelayanan tinggi (aspal).

Tingkat pelayanan prasarana jalan di Kota Pati dapat dikatakan sudah memadai, dalam arti seluruh desa telah terhubung dengan jaringan jalan. Pola

jaringan jalan di kota Pati adalah lingkaran dua arah dan *radial concentric* (lingkaran dengan jari-jari di tengahnya), sebagai sistem transportasi dasar.

Untuk menentukan lokasi fasilitas SMP dipergunakan pendekatan minimasi jarak dari jalan yang mengasumsikan bahwa suatu lokasi fasilitas SMP cenderung mencari lokasi fasilitas dekat dengan jalan. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan *buffer* jarak dari jalan 300 meter. *Buffer* 300 meter adalah merupakan jarak maksimum lokasi layanan dari jalan. Adapun *buffer* jarak dari jalan, meliputi jalan sebagai berikut:

- d. Jalan Arteri Primer yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang ke satu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang kedua. Jalan yang masuk dalam kategori jalan ini adalah Jl. Pati-Kudus, Jl. Pati-Juwana, Jl. Lingkar (Ring Road).
- e. Jalan Arteri Sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Jalan Arteri Sekunder di Kota Pati, meliputi: Jl. Diponegoro, Jl. Kembang Joyo, Jl. Juru Mertani dan Jl. Ki Ageng Selo.
- f. Jalan Kolektor Primer yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga. Yang termasuk jalan kolektor primer yaitu Jl. Pati-Tayu, Jl. Pati-Purwodadi.
- g. Jalan Kolektor Sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan

sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Untuk skor dan peta jarak dari jalan terdapat Gambar 4.5.

4.6. Analisa Integrasi Sebaran Lokasi SMP dan Sebaran Permukiman

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan, bahwa pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap. Hal ini ditujukan mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau disekitarnya. Berkembangnya kawasan pinggiran tentu berpotensi untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan pinggiran baik pada lokasi yang berbatasan langsung dengan kota induk maupun pada jarak yang lebih jauh lagi. Melalui pendekatan yang integratif diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan secara optimal yang pada akhirnya membentuk suatu keterkaitan pusat dan tepi dalam sistem perkembangan kota.

Seperti dikemukakan oleh Prahasta (2003) GIS merupakan suatu teknologi baru yang pada saat ini menjadi alat bantu (tools) yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut dan data spasial. Dengan GIS, integrasi sebaran SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati dianalisis dengan melakukan *overlay* terhadap:

1. Peta Jangkauan Lokasi SMP.
2. Peta Kebutuhan SMP Berdasarkan Jumlah Penduduk Usia Sekolah.
3. Peta Jarak dari Jalan Terhadap Lokasi SMP.
4. Peta Pemanfaatan Lahan.

Hasil analisis *overlay* terhadap ke empat peta di atas, menjadi peta arahan sebaran lokasi SMP baru di Kota Pati, secara jelas dapat dilihat pada Gambar 4.6. Berdasarkan hasil *overlay*, nampak bahwa skor terendah adalah 4 yaitu lokasi yang berada di wilayah BWK Pusat Kota, karena:

1. Berada dalam jangkauan lokasi SMP.
2. Memiliki kebutuhan SMP paling rendah, yaitu 0 unit SMP.
3. Merupakan lahan terbangun.
4. Berada di luar jarak dari jalan.

BWK Pusat Kota yang wilayahnya meliputi Kelurahan Pati Wetan, Pati Kidul, Plangitan, Puri, Winong, Ngarus, Pati Lor, Parenggan, dan Kalidoro kondisi sebaran permukiman pola tersebar merata. Pemusatan fasilitas sarana pendidikan SMP pada BWK Pusat Kota sebab SMP di Kota Pati yang berjumlah 15 unit sejumlah 11 unit SMP terletak pada BWK Pusat Kota, fasilitas sarana pendidikan SMP berada di Kelurahan Pati Kidul (SMP Keluarga Pati), Plangitan (SMP Negeri 2 Pati, SMP Negeri 5 Pati, SMP Nasional dan SMP Purnama Pati), Puri (SMP Negeri 4 Pati), Winong (SMP Negeri 3 Pati), Pati Lor (SMP Negeri 8 Pati, SMP Muhammadiyah, dan SMP Islam Terpadu Pati), dan Kalidoro (SMP Negeri 1 Pati). Artinya kebutuhan fasilitas sarana pendidikan sudah melampaui jumlah standar (*over supply*). Seluruh wilayah pada BWK Pusat Kota termasuk pada jangkauan layanan SMP, bahkan jangkauan layanannya terjadi *over lapping*. Dengan demikian wilayah BWK Pusat Kota sebaran lokasi SMP sudah terintegrasi dengan sebaran permukimannya.

BWK I wilayahnya meliputi Kelurahan Sidokerto, Sukoharjo, Muktiharjo dan sebagian Desa Badegan kondisi permukiman pola tersebar tidak merata, akibat dari lahan pertanian. Di BWK I disamping permukiman yang sudah ada, muncul permukiman-permukiman baru yaitu perumahan Sekar Rukun, Perumahan Rondole Indah di Desa Muktiharjo. Di Desa Sukoharjo muncul perumahan Sukoharjo Indah dan Perumahan Gunung Bedah. Fasilitas sarana pendidikan SMP di wilayah tersebut ada 1 (satu) dengan penduduk usia sekolah yang hanya 452 jiwa, maka kebutuhan fasilitas sarana pendidikan SMP yaitu 1 (satu) unit. Dengan jangkauan layanan 1 km (1000 meter) wilayah BWK I termasuk dalam jangkauan lokasi SMP yang ada, meskipun tidak maksimal menjangkau batas wilayah terluar. Integrasi sebaran lokasi SMP di wilayah BWK I sudah terintegrasi sebaran permukimannya.

BWK II dengan wilayah yang meliputi Desa Gajahmati, Mustokoharjo, Semampir, Sidoharjo, Sarirejo, Geritan, Dengkek, Sugiharjo, Widorokandang, dan Kutoharjo permukimannya bertipe menyebar akibat lahan pertanian. Disamping permukiman yang sudah ada, muncul permukiman baru yaitu Perumahan Kutoharjo Indah di Desa Kutoharjo, Perumahan Wijaya Kusuma di Desa Sarirejo. Kondisi fasilitas sarana pendidikan SMP tidak memuaskan, hal ini dapat dilihat bahwa jumlah fasilitas sarana pendidikan SMP hanya 1 (satu) dan lokasinya berada di pinggir sebelah utara perbatasan wilayah BWK II yaitu di desa Kutoharjo. Wilayah permukiman BWK II yang terjangkau layanan SMP adalah Desa Kutoharjo (SMP Negeri 7 Pati), Sidoharjo, Semampir (SMP Negeri 1 Pati). Dengan penduduk usia sekolah yang berjumlah 1647 jiwa, maka fasilitas sarana

pendidikan SMP membutuhkan 4 (empat) unit SMP. Permukiman-permukiman di daerah pinggiran BWK II jarak jangkauan ke fasilitas sarana pendidikan SMP sebagian besar cukup jauh (rata-rata 2 - 5 km). Dengan demikian integrasi sebaran lokasi SMP di wilayah BWK II belum terintegrasi sebaran permukiman.

BWK III dengan wilayah yang meliputi Desa Panjunan, Blaru, Sukokulon Jimbaran, Ngawen, Margorejo, Penambuhan, Langenharjo, Dadirejo permukiman berpola tersebar tidak merata, akibat lahan pertanian. Kondisi fasilitas sarana pendidikan SMP tidak memuaskan, hal ini dapat dilihat bahwa jumlah fasilitas sarana pendidikan SMP hanya 2 (dua) dan lokasinya berada di pinggir sebelah barat dan berada di pinggir sebelah timur perbatasan wilayah BWK III yaitu di Desa Badegan dan di Desa Langgenharjo. Wilayah permukiman BWK III yang terjangkau layanan SMP adalah Sebagian Desa Badegan, dan Margorejo (SMP Negeri 1 Margorejo) dan Desa Langgenharjo, Panjunan dan Dadirejo (SMP Negeri 2 Margorejo). Dengan penduduk usia sekolah yang berjumlah 1554 jiwa, BWK III masih membutuhkan fasilitas sarana pendidikan 3 (tiga) unit SMP. Permukiman-permukiman di daerah pinggiran BWK III jarak jangkauan ke lokasi fasilitas sarana pendidikan SMP sebagian besar cukup jauh (rata-rata 2-5 km). Dengan demikian sebaran lokasi SMP di wilayah BWK III belum terintegrasi sebaran permukiman.

4.7. Perencanaan

Untuk memperoleh integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati, maka berdasarkan hasil *overlay* ditemukan penambahan fasilitas sarana pendidikan, lokasi yang menjadi prioritas pertama dan prioritas ke

dua selanjutnya dilakukan *overlay* dengan peta sebaran permukiman, melalui pendekatan untuk melakukan suatu penataan fisik lingkungan berdasarkan:

- I. Prinsip *Neighborhood Unit* yaitu Prinsip Social Governance, terjadinya pengaturan dan pengelolaan (Golany, 1984).
- II. Syarat *Neighborhood Unit* yaitu : (1) memiliki jarak layanan yang mudah dicapai dengan berjalan kaki, dimana daya jangkau jarak layanan efektif setiap fasilitas pelayanan sosial akan mempengaruhi ukuran *neighborhood*, sebagai pertimbangan utama adalah kebebasan dalam gangguan transportasi berkecepatan tinggi; (2) Jumlah warga, yaitu ukuran jumlah anggota menghasilkan suatu ukuran kepadatan yang memungkinkan tingkat ikatan fisik dan area komunitas tetap tinggi, dengan tetap menjaga keseimbangan dengan daya dukung alam.

Berdasarkan jangkauan maksimum yang mensyaratkan 1 Km dari permukiman ke tempat pelayanan, maka sangat memungkinkan untuk membangun fasilitas sarana pendidikan SMP karena rata-rata jangkauan terdekat fasilitas sarana pendidikan yang ada ditempuh dengan jarak 5 Km antar desa yang belum memiliki sarana pelayanan ini.

Sedangkan berdasarkan ambang penduduk untuk fasilitas sarana pendidikan SMP dari hasil penelitian sebelumnya yaitu 1 unit (4800 penduduk atau diukur dari penduduk usia sekolah 360 orang), desa dalam BWK yang belum memiliki fasilitas sarana pendidikan SMP adalah Desa Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo dan Gajahmati di wilayah BWK II sebagai prioritas pertama, sedangkan prioritas ke dua meliputi Desa Sukokulon, Ngawen, Penambuhan dan Margorejo di wilayah BWK III. Lokasi dengan nilai tertinggi yaitu 11 meliputi Desa Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo dan

Gajahmati di wilayah BWK II sebagai prioritas pertama, sedangkan prioritas ke dua meliputi Desa Sukokulon, Ngawen, Penambuhan dan Margorejo di wilayah BWK III dengan skor 10. Hasil *overlay* terhadap lokasi yang menjadi prioritas pertama dan prioritas ke dua tersebut menghasilkan peta integrasi alternatif lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati. Sehingga sebaran lokasi SMP terintegrasi sebaran permukiman di seluruh BWK di Kota Pati. Peta arahan integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati secara jelas dapat dilihat pada Gambar 4.7

4.8. Temuan Penelitian

1. Kota Pati yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial skala kabupaten, kota, kecamatan dan desa desa sekitarnya memiliki 4 (empat) BWK. BWK Pusat Kota yaitu meliputi Kelurahan Pati Wetan, Pati Kidul, Plangitan, Puri, Winong , Ngarus, Pati Lor, Parenggan, dan Kalidoro permukimannya berpola terpusat, sedangkan BWK I yaitu meliputi Kelurahan Sidokerto, Sukoharjo, Muktiharjo dan sebagian Desa Badegan, BWK II meliputi Kelurahan Gajahmati, Mustokoharjo, Semampir, Sidoharjo, Sarirejo, Geritan, Dengkek, Sugiharjo, Widorokandang, Kutoharjo dan BWK III meliputi Kelurahan Panjunan, Blaru, Sukokulon Jimbaran, Ngawen, Margorejo, Penambuhan, Langenharjo, Dadirejo pola permukimannya berpola tersebar akibat lahan pertanian.
2. Kota Pati memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan, hanya BWK Pusat Kota yang memiliki sarana SMP yang jumlahnya banyak. Di wilayah BWK Pusat Kota integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman tercapai, bahkan melebihi batas ambang penduduk yang harus dilayani. Kondisi ini sesuai

dengan teori Sujarto (1988), Bintarto (1986) dan Walter Christaller dalam Djojodipuro.M (1992), bahwa distribusi fasilitas lokasi terdapat pada kedudukan pusat pelayanan dan dipengaruhi faktor kepadatan penduduk dan lingkungan. Sedangkan permukiman-permukiman di daerah pinggiran kota yang meliputi BWK I, BWK II dan BWK III, integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman belum optimal. Ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan SMP belum optimal padahal batas ambang minimum penduduk melebihi kapasitasnya dan sudah melebihi jangkauan lokasi maksimum. Kondisi ini belum sesuai dengan teori Dillinger (1994), Glony dalam Woro (1993) dan peraturan PU 1987 (SNI 2004) yang menyatakan bahwa perkembangan kota membutuhkan pelayanan diukur dari sisi *supply-demand*, daya lahan dan standar saat ini.

3. Melalui analisis *overlay* penentuan sebaran lokasi SMP yang berintegrasi dengan sebaran permukiman di Kota Pati, diketahui bahwa lokasi yang berada di Desa Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo dan Gajahmati di wilayah BWK II sebagai prioritas pertama. Sedangkan prioritas ke dua meliputi Desa Sukokulon, Ngawen, Penambuhan dan Margorejo di wilayah BWK III, merupakan lokasi alternatif untuk pengadaan sarana SMP yang terintegrasi dengan sebaran permukiman di Kota Pati.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian Integrasi Sebaran Lokasi SMP dan Sebaran Permukiman di Kota Pati sebagai berikut:

1. Sebaran permukiman di Kota Pati bervariasi yaitu tersebar merata dan tersebar tidak merata. Hal ini terjadi dikarenakan faktor orientasi pusat permukiman dan kondisi fisik wilayah. Persebaran permukiman di BWK Pusat Kota tipe tersebar merata diakibatkan keberadaannya terletak di pusat kota dan memiliki fungsi wilayah sebagai pusat pelayanan sosial dan ekonomi yang berfungsi melayani skala besar untuk wilayah kabupaten, kecamatan, kota dan desa. Sedangkan persebaran permukiman di BWK I, BWK II dan BWK III tipe tersebar tidak merata diakibatkan keberadaannya terletak daerah pertanian.
2. Sebaran lokasi SMP terkonsentrasi di BWK Pusat Kota, diakibatkan keberadaannya terletak di pusat kota dan memiliki fungsi wilayah sebagai pusat pelayanan sosial dan ekonomi yang berfungsi melayani skala besar untuk wilayah kabupaten, kecamatan, kota dan desa dan memiliki kemudahan aksesibilitas langsung terhadap ruas-ruas jalan utama serta dilayani oleh

sarana transportasi umum maupun transportasi lokal. Sedangkan di BWK wilayah pinggiran sebaran lokasi SMP tidak optimal. Fasilitas sarana SMP yang sudah ada tersebar dengan jarak yang cukup jauh dari permukiman yang tersebar di daerah pinggiran yakni sekitar 5 km, sedangkan menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/KPTS/1987 Tanggal 31 Agustus 1987 yang telah disahkan menjadi SNI 03-6981-2004 jangkauan lokasi maksimum lokasi SMP adalah 1 km (1000 meter).

3. Penduduk usia sekolah di Kota Pati teridentifikasi bahwa batas ambang minimum penduduk yang harus dilayani oleh suatu fasilitas sarana pendidikan (SMP) sudah melebihi batas ambang minimum penduduk terhadap fasilitas yang ada sekarang dengan standar menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/KPTS/1987 Tanggal 31 Agustus 1987 yang telah disahkan menjadi SNI 03-6981-2004, sehingga membutuhkan penambahan sarana pendidikan SMP.
4. Kota Pati dengan lahan yang sebagian besar tidak terbangun khususnya di wilayah pinggiran kota yaitu BWK I, BWK II dan BWK III memberikan fleksibilitas dan kemudahan pengembangan fasilitas dan prasarana kota lainnya, khususnya sarana pendidikan SMP dengan tetap memegang karakteristik kota Pati, yaitu terdapatnya lahan pertanian yang subur di dalam kawasan perkotaan, tersedianya lahan yang subur menuntut kehati-hatian dalam mengkonversi lahan.
5. Pola jaringan jalan di kota Pati adalah lingkaran dua arah dan *radial concentric* (lingkaran dengan jari-jari di tengahnya), sebagai sistem transportasi dasar,

sebagai kota yang tumbuh di jalan arteri primer “Pantai Utara Jawa” (Pantura) Jakarta-Semarang-Surabaya memberikan peranan yang penting dalam menunjang pergerakan barang/penumpang dari satu kota ke kota lainnya. Ketersediaan prasarana jalan yang baik (beraspal) di Kota Pati memberikan kemudahan aksesibilitas kepada peserta didik menuju lokasi fasilitas pelayanan pendidikan.

6. Integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman pada penelitian ini lebih diprioritaskan pada permukiman di daerah pinggiran yang memiliki tingkat kebutuhan fasilitas sarana pendidikan SMP paling tinggi. Tingkat kebutuhan SMP yang tinggi berdasarkan analisis *overlay* terdapat pada BWK II yang lokasinya terletak pada Desa Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo dan Gajahmati. Untuk ke lima desa dalam BWK II ini merupakan lokasi untuk pengadaan sarana SMP yang terintegrasi dengan sebaran permukiman di daerah pinggiran. Kebutuhan Sarana SMP pada level berikutnya berada pada BWK III, meliputi Desa Sukokulon, Margorejo, Ngawen, dan Penambuhan, dengan ketersediaan sarana SMP, maka dapat dilakukan peningkatan pelayanan pendidikan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
7. Ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan SMP di Kota Pati belum optimal padahal batas ambang minimum penduduk melebihi kapasitasnya dan sudah melebihi jangkauan lokasi maksimum. Kondisi ini belum sesuai dengan teori Dillinger (1994), Glony dalam Woro (1993) dan peraturan PU 1987 (SNI 2004) yang menyatakan bahwa perkembangan kota membutuhkan pelayanan

diukur dari sisi *supply-demand*, daya lahan dan standar saat ini. Hanya di wilayah BWK Pusat Kota integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman optimal. Kondisi ini sesuai dengan teori Sujarto (1988), Bintarto (1986) dan Walter Christaller dalam Djojodipuro.M (1992), bahwa distribusi fasilitas lokasi terdapat pada kedudukan pusat pelayanan dan dipengaruhi faktor kepadatan penduduk dan lingkungan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kajian beberapa aspek dan kesimpulan mengenai integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati, maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Sebagai dasar untuk mendukung upaya penyebaran, perkembangan dan pertumbuhan sebaran permukiman lingkungan terbangun di Kota Pati khususnya yang berada di wilayah pinggiran perlu adanya penyediaan sarana SMP secara efisien dan ekonomis dalam melayani seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan yang integratif dengan memadukan semua aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara fungsional dan spasial, maka dapat dilakukan dengan pengadaan unit SMP baru.
2. Untuk memberikan pelayanan pendidikan SMP di daerah pinggiran yakni BWK II dan BWK III, fasilitas sarana pendidikan SMP belum tersedia secara memadai, sehingga sebaran lokasi SMP belum terintegrasi dengan permukiman yang ada. Oleh karena itu ditempuh dengan cara merencanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di wilayah tersebut.

3. Untuk integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati, penentuan lokasi sekolah memanfaatkan hasil analisis adalah sebagai berikut pada BWK II yakni desa Desa Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo dan Gajahmati sebagai prioritas pertama. Lokasi sarana SMP pada prioritas ke dua berada pada BWK III, meliputi Desa Sukokulon, Margorejo, Ngawen, dan Penambuhan, sehingga tercipta kondisi dimana sekolah mudah dijangkau (*accessible*) dan dapat memenuhi sisi permintaan (*demand*) masyarakat tanpa meninggalkan karakteristik Kota Pati.

Mengingat berbagai kelemahan dalam penelitian ini, direkomendasikan untuk melakukan spesifikasi dan penambahan pada variabel-variabel yang terlibat seperti kemiringan lahan, pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara yang belum diterapkan dalam penelitian ini dalam menentukan integrasi sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman di Kota Pati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Branch, Melville C., 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Bintarto. 1982. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- _____, 1986. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budihardjo, Eko, dkk. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Catanese, J., Anthony dan Snyder, C., James. 1992. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Daldjoeni, N. 1992. *Seluk Beluk Masyarakat Kota*. Bandung: Penerbit Alumni.
- _____. 1992. *Geografi Baru, Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Daniels, P. W., A. M. Warnes, eds. 1988. *Movement in Cities: Spatial Perspectives on Urban Transport and Travel*. London: Methuen & Co.
- De Chiara, Yoseph, and Lee Koppelman. 1975. *Urban Planning and Design Criteria*. Van Nostrand Reinhold Company
- Djoyodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Golany, Gideon. 1976. *Social Planning. New Town Planning. Principles and practice*. New York: John Wiley and Sons Inc.
- _____, 1984. *Ethics and Urban Design: Cultural, Form, and Environment*, New York: John Willey and Sons Inc.
- Grigg, Neil S. 1988. *Infrastructure Engineering ang Management*. New York: A Wiley-Interscience Publication.
- Gulo, W, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- Hagget, Peter. 1968. *Locational Analysis in Human Geography*. London: Edward Arnold LTD.
- Hansen, Niles M. 1972. *Growth Centers in Regional Economic Development*. New York: The Free Press
- Hong Chou, Yue. 1997. *Exploring Spatial Analysis in Geographic Information System*. Santa Fe. Onword Press.
- Istijanto. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Johnston, R.J. (ed.). 1981. *The Dictionary of Human Geography*. Oxford: Basil Blackwell Publisher Limited.
- Kodoatie, Robert J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas

- Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Prahasta, Eddy. 2003. *Konsep - konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*. Bandung: Penerbit Informatika.
- _____, 2003. *Sistem Informasi Geografis : Arc View Lanjut*. Bandung: Penerbit Informatika.
- Purnomo, Hari. 2004. *Perencanaan dan Perancangan Fasilitas*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Rohe, William and Gates, Laurend. 1985. *Planning with Neighborhood*. The University of North Carolina Press.
- Rugg, S Dean. 1991. *Spatial Foundation of Urbanism*. Nebraska : University of Nebraska.
- Sugiyono. 2005. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sudjarto, Joko. 1977. *Distribusi Fasilitas Sosial (Pokok-pokok Pertimbangan untuk Perencanaan)*. Dalam *Perencanaan Fisik*. Bandung: Kerjasama Depdagri dan LPP Departemen Planologi ITB.
- _____, 1989. *Kinerja dan Dampak Pembangunan Kota Baru*. Bandung: ITB
- Sumaatmadja, Nursid. 1988. *Studi Geografi, Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni.
- Suryadi, Ace dan D. Budimansyah. 2004. *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Bandung: PT Genesindo.
- Sutikno, M. Sobry. 2006. *Pendidikan Sekarang dan Masa Depan*. Mataram, NTP Press.
- Yunus. Hadi Sabari 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- _____, 2005. *Klasifikasi Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Terbitan Berkala/Terbatas

- Departemen Pendidikan Nasional: *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007*. Jakarta, 2007.
- Sudjarto, Joko. 1976. *Pemekaran kota dan dekonstruksi planologi*, Prisma, Nomor 6, Juli Th. V

Kelompok Peraturan

- Depdiknas. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD / MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP / MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA / MA).
- Depdiknas. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. 2005. Standar Nasional Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/KPTS/1987. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kota.

Pemerintah Kabupaten Pati. Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati 2005 – 2014
Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan

SKRIPSI/TESIS

Ratna Iswari Utomo. 2006. *Kajian Optimasi pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar di Kota Kecamatan Jalancagak – Subang* Tesis, MTPWK, Undip, Semarang
Ibnu Sukadi. 2008. *Model Pemanfaatan Prasarana Belajar di Luar Sekolah Dalam Ruang Kota (Studi Kasus Kota Pati)* Tesis, MTPWK, Undip, Semarang

LAMPIRAN

Nearest Neighbour Statistik

(Sebaran Permukiman di BWK Pusat Kota)

Titik	Jarak (Km)
1-3	0,80
3-1	0,80
2-4	1,00
4-5	0,90
5-4	0,90
6-7	0,55
7-6	0,55
8-9	0,55
9-8	0,55
$\sum r$	6,60

Perhitungan :

➤ Luas (L) = 6,01 Km

➤ $\sum r = 6,60$ Km

➤ \sum Titik (N) = 9

$$\begin{aligned} \text{➤ } R &= \frac{(2\sqrt{p}) \sum r}{N} \\ &= \frac{(2\sqrt{\frac{6,01}{9}}) 6,6}{9} \end{aligned}$$

$$= 1,795$$

➤ R = 1,795 menunjukkan bahwa pola penyebaran permukiman adalah tersebar merata.

LAMPIRAN

Nearest Neighbour Statistik
(Sebaran SMP di BWK Pusat Kota)

Titik	Jarak (Km)
1-2	0,25
2-1	0,25
3-4	0,45
4-5	1,00
6-7	0,50
7-8	0,30
8-9	0,35
10-11	0,25
11-10	0,25
$\sum r$	3,60

Perhitungan :

➤ Luas (L) = 6,01 Km

➤ $\sum r = 3,60$ Km

➤ \sum Titik (N) = 11

$$\begin{aligned}
 \text{➤ } R &= \frac{(2\sqrt{p}) \sum r}{N} \\
 &= \frac{(2\sqrt{\frac{11}{6,01}}) 3,6}{11} \\
 &= 0,885
 \end{aligned}$$

➤ R = 0,885 menunjukkan bahwa pola penyebaran sekolah (SMP) adalah tersebar tidak merata.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Drs. HARGITO, MT

Lahir di Pati, 17 April 1961. Bertempat tinggal di Jl. Bajo Gg 3 Nomor 11 Juwana-Pati 59185. Pada tahun 1991 diterima sebagai Guru PNS di SMP Negeri 2 Wirosari Kabupaten Grobogan. Tahun 2000, penulis mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. Penulis juga masih terdaftar sebagai Ketua ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) Kabupaten Pati.

Riwayat pendidikan penulis mulai dari SD sampai SMP diselesaikan di Juwana, pendidikan SPG di Pati, Pada tahun 1984 penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda di Universitas Muria Kudus Fakultas Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Tahun 1988 penulis memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan pada Universitas Muria Kudus dengan tesis yang berjudul "Studi Korelasi Antara Motivasi Belajar dengan Popularitas Hubungan Sosial Siswa" di Kota Kudus. Penulis mendapatkan kesempatan untuk meraih jenjang strata dua melewati program beasiswa unggulan kerjasama BPKLN Departemen Pendidikan Nasional dan MPWK UNDIP pada tahun 2007 hingga dapat meraih gelar Magister Teknik pada tanggal 25 Maret 2009 dengan karya tulis atau tesis yang berjudul "Integrasi Sebaran Lokasi SMP dan Sebaran Permukiman di Kota Pati".

Penulis merupakan anak ke tiga dari 7 bersaudara: (1) Hartono, (2) Hartini, (3) Hartatik, (4) Harningsih, (5) Harwiyanto, (6) Harsetyotanto dari pasangan bapak Sudir dan ibu Hj. Waeniti Waemonah.

